



NARASI TUNGGAL PBB

Gagal Di Suriah,
PBB Membuat *Prevent Violent Extremism*



K. Mustarom

NARASI TUNGGAL PBB: Gagal di Suriah, PBB Membuat *Prevent Violent Extremism*

K. Mustarom

Laporan Khusus

Edisi 06/April 2016

ABOUT US

Laporan ini merupakan sebuah publikasi dari Lembaga Kajian Syamina (LKS). LKS merupakan sebuah lembaga kajian independen yang bekerja dalam rangka membantu masyarakat untuk mencegah segala bentuk kezaliman. Publikasi ini didesain untuk dibaca oleh pengambil kebijakan dan dapat diakses oleh semua elemen masyarakat. Laporan yang terbit sejak tahun 2013 ini merupakan salah satu dari sekian banyak media yang mengajak segenap elemen umat untuk bekerja mencegah kezaliman. Media ini berusaha untuk menjadi corong kebenaran yang ditujukan kepada segenap lapisan dan tokoh masyarakat agar sadar realitas dan peduli terhadap hajat akan keadilan. Isinya mengemukakan

gagasan ilmiah dan menitikberatkan pada metode analisis dengan uraian yang lugas dan tujuan yang legal. Pandangan yang tertuang dalam laporan ini merupakan pendapat yang diekspresikan oleh masing-masing penulis.

Untuk komentar atau pertanyaan tentang publikasi kami,
kirimkan e-mail ke:

lk.syamina@gmail.com.

Seluruh laporan kami bisa didownload di website:

www.syamina.org

DAFTAR ISI

Daftar Isi — 3

Executive Summary — 4

Narasi Tunggal PBB: Gagal Di Suriah, PBB Membuat Prevent Violent Extremism — 7

- A. Suriah Mengungkap Fakta Ketidakberdayaan PBB — 7
- B. Plan Of Action PBB Untuk Mencegah Violent Extremism — 11
 - a. Dialog dan Pencegahan Konflik — 13
 - b. Memperkuat Good Governance, HAM, dan Aturan Hukum — 13
 - c. Partisipasi Komunitas — 14
 - d. Penguatan Pemuda — 14
 - e. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan — 14
 - f. Pendidikan, Pengembangan Skill, dan Kemudahan Lapangan Kerja — 14
 - g. Komunikasi Strategis, Internet, dan Media Sosial — 15
- C. Cacat Dalam Program *Prevent Violent Extremism* (PVE) — 15
- D. Pencegahan Yang Tidak Mencegah — 18
- E. Apa Yang Dicegah? — 22

EXECUTIVE SUMMARY

Konflik di Suriah kini memasuki tahun kelima. Jumlah korban semakin meningkat, hingga mendekati 500.000 korban jiwa. Bagi rakyat Suriah, pengeboman, pembunuhan dan penyiksaan adalah horor yang mereka hadapi setiap hari.

Suriah mengungkap sebuah fakta tentang ketidakberdayaan Dewan Keamanan PBB di era rivalitas yang tajam hari ini. Karena di Suriah, sistem di PBB bekerja, tapi tidak untuk rakyat Suriah.

Apa yang terungkap dari konflik di Suriah tentang PBB adalah bahwa sistem tersebut “tidak bermoral”, bahkan saat ia “berfungsi” sekalipun. Ia dipasang untuk menjalankan kepentingan *great powers*—dan mengurangi kemungkinan terjadinya perang di antara mereka. Sistem tersebut memberikan sebuah tatanan dasar. Tapi, tatanan tersebut jauh dari keadilan—sebagaimana yang kita lihat di Suriah, dan gagal untuk menghadirkan perdamaian.

Banyak yang terkejut dengan meningkatnya eskalasi kekerasan yang terjadi di sana. Namun, sejatinya hal yang paling mengejutkan adalah semua orang terkejut dengan kegagalan PBB tersebut. PBB adalah organisasi yang cacat yang tidak mampu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ia nyatakan, apalagi memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai pihak yang tertindas dan mengalami penderitaan di seluruh dunia—yang menjadikan PBB sebagai harapan terakhir mereka.

Setelah berulang kali mengeluarkan resolusi untuk mengatasi konflik di Suriah, dengan nilai F yang mereka dapatkan, PBB mengeluarkan *Plan of Action to Prevent Violent Extremism*.

Mereka menganggap kelompok radikal Islam sebagai ancaman terbesar bagi tatanan dunia dan nilai-nilai Barat. Untuk melawannya, segala upaya pun dilakukan, mulai dari serangan darat, serangan udara, pembunuhan, penyiksaan, penahanan

secara masif, hingga sanksi ekonomi. Yang terbaru, mereka membuat pendekatan lain yang diberi nama “Prevent Violent Extremism” untuk mencegah tersebarnya paham-paham ekstrimisme. Langkah ini diambil karena program deradikalisasi, yang mencoba untuk mengubah pikiran orang-orang yang sudah radikal, dinilai tidak efektif.

Globalisasi program PVE ini tidak lepas dari usaha pemerintah AS sebagai penggerak utamanya. Plan of Action memberikan lebih dari 70 rekomendasi kepada seluruh negara anggota dan juga sistem PBB untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan. PBB juga merekomendasikan negara anggotanya untuk mengadopsi inisiatif yang ada dalam *plan of action* tersebut yang berfokus pada tujuh area kunci untuk menangkal *violent extremism*, yaitu:

- a. Dialog dan Pencegahan Konflik
- b. Memperkuat Good Governance, HAM, dan Aturan Hukum
- c. Pelibatan Komunitas
- d. Penguatan Pemuda
- e. Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- f. Pendidikan, Pengembangan Skill, dan Kemudahan Lapangan Kerja
- g. Komunikasi Strategis, Internet, dan Media Sosial

Plan of action tersebut bukan tanpa kritikan, banyak lubang cacat di sana yang membuat sejumlah akademisi memberikan catatan dan kritikan.

Pertama, tidak mendefinisikan apa itu *violent extremism*, bahkan PBB menyerahkan definisi tersebut pada negara masing-masing yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan represinya atas rakyatnya.

Kedua, tidak mampu memberi bukti yang meyakinkan tentang penyebab *violent extremism*. Tidak banyak bukti yang mendukung penyebab *violent extremism* yang diklaim oleh *Plan of Action*. *Plan of Action* sendiri menjelaskan bahwa tidak ada konsensus di antara para ahli tentang “apa yang menyebabkan *violent extremism*” dan tidak ada bukti kuantitatif tentang apa yang menyebabkan seseorang menjadi ekstrimis atau teradikalisasi. Tentu saja, konsensus ini akan makin sulit dicapai jika definisi saja tidak jelas.

Ketiga, PVE memiliki dampak menyeluruh, di mana ia bisa memasukkan kepentingan yang legal di bawah bendera “menekan *violent extremism*”. *Plan of Action* tidak mendasarkan konsep *violent extremism* pada hukum internasional. Tidak jelas, apakah seluruh aksi *violent extremism* bisa dianggap melanggar hukum, terutama yang terjadi di saat konflik. Namun di saat yang sama, *Plan of Action* berusaha menampakkan diri menghormati hukum internasional sebagai jalan utama untuk menghentikan momok *violent extremism*.

Keempat, jika PVE gagal, biaya politik dan keamanannya tidaklah nol. Jika *Plan of Action* diimplementasikan, sebagaimana harapan Sekjen PBB, maka seluruh negara di dunia akan memiliki *National Plan of Action* tentang PVE. Negara akan mengerahkan sumber dayanya untuk usaha ini. Mereka akan membuat hukum baru. Mereka akan mengubah ke mana dana pembangunan dan bantuan akan diinvestasikan. Para pejabat mereka akan terus menyorot komunitas, kelompok etnis, atau kelompok agama yang “rentan” terhadap terorisme. Komunitas tersebut akan terus diawasi atas nama PVE. Negara akan meningkatkan usaha untuk membuat orang “lebih moderat”, atau mengajari mereka bahwa ‘teks-teks agama mereka mempunyai tafsir yang lain dari yang mereka yakini’.

Karenanya, PVE berpotensi menciptakan para *violent extremist* sebanyak yang berhasil mereka cegah. Ada potensi pukulan balik di sini, dan hal

ini harus dipandang serius dalam lingkungan geopolitik saat ini.

Represi yang timbul dari inisiatif tersebut tidaklah mengejutkan. Akar dari semua itu terdapat pada cacat semantik dan konseptual yang melekat di dalamnya. Strategi tersebut didasarkan pada “pemahaman yang simplistik dari proses [radikalisasi] sebagai sebuah jalur pasti kepada *violent extremism* dengan tanda yang bisa diidentifikasi sepanjang jalur tersebut.” Dalam teori tersebut, jika seseorang berpikiran radikal, pada ujungnya otomatis dia akan menjadi seorang teroris. Padahal, meski sudah banyak dilakukan riset dengan dana yang sangat besar, “tidak ada data statistik yang otoritatif tentang jalur yang membawa seseorang menjadi radikal.”

Di atas kertas, hampir semua strategi untuk melawan ekstremisme kekerasan bersifat generik. Namun, dalam praktiknya, mereka cenderung menargetkan kelompok tertentu yang dicap paling ‘beresiko’ tertarik pada ekstremisme kekerasan. Pendekatan semacam ini bisa sangat diskriminatif dan memberikan stigma berbagai kelompok minoritas, etnis, agama atau adat tertentu. Inti strategi ini adalah persepsi bahwa untuk mencegah terorisme, yang mereka lihat sebagai ancaman terbesar di era ini, mereka harus mencegah Muslim yang ‘rentan’ dari teradikalisasi oleh ekstremisme kekerasan. Mereka menganggap ideologi sebagai akar dari terorisme. Strategi *Prevent* menganggap keyakinan Islam sebagai masalah.

Masalah lain yang ada pada strategi PVE adalah bahwa ia mencoba untuk mencegah ekstremisme kekerasan hanya dari anggota masyarakat Muslim, dan mengabaikan kelompok-kelompok ekstremis lainnya.

Profesor Arun Kundnani, dari New York University, menyimpulkan PVE sebagai “strategi untuk melakukan intervensi di dalam dinamika umat Islam dalam rangka memenangkan hati dan pikiran dan mengamankan kesetiaan terhadap

demokrasi liberal Barat.” Program PVE pada kenyataannya adalah kebijakan pemerintah terhadap Islam. PVE datang untuk mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan umat Islam. Hati dan pikiran mereka kini menjadi target dari sebuah pengawasan, pemetaan, dan propaganda yang terstruktur.

Dengan PVE, mereka berusaha masuk ke dalam ranah teologis untuk menentukan bagaimana Islam yang benar. Realita ini direpresentasikan oleh pernyataan gamblang yang di sampaikan oleh Tony Abbott, mantan Perdana Menteri Australia, yang menyatakan bahwa dalam kampanye hati dan pikiran melawan pandangan ekstrem dalam keyakinan Islam, diperlukan revolusi agama. “Kita tidak bisa terus menyangkal tentang masalah besar yang ada dalam Islam. Islam perlu mendeligitimasi perintah untuk membunuh orang yang menghina Nabi—dan hanya Muslim yang bisa melakukannya.”

Dalam pandangannya, Islam tidak pernah memiliki periode reformasi atau pencerahan yang sangat dibutuhkan. Bahkan, ia menyimpulkan bahwa beberapa kultur tidaklah sama sederajat. “Kita harus siap untuk memproklamirkan superioritas kultur kita dibanding kultur mereka yang membunuh orang atas nama Tuhan.”

Demikian juga Tony Blair. Dalam otobiografinya, ia menulis:

“Perang ini, saya khawatir, bukanlah perang antara kelompok ekstremis kecil dan tidak representatif melawan kita. Atau, paling tidak, bukan hanya itu. Perang ini juga adalah perjuangan fundamental terhadap pikiran, hati, dan jiwa Islam.”

Mereka melakukannya dengan mensponsori kelompok moderat untuk mempromosikan pesan-pesan anti ekstremis yang diminta oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam PVE, pemerintah melakukan intervensi ke dalam debat teologis tentang makna sejati dari agama. Tentu saja, hal ini merupakan pelanggaran yang sangat

paradoks dengan prinsip sekularisme yang dianut pemerintah yang komunitas umat Islam justru dipaksa untuk berpegang atasnya. Bagi organisasi Islam yang mampu mempresentasikan diri sebagai “moderat”, bantuan keuangan dan sumber daya akan diberikan. Perbedaan antara “moderat” dan “ekstremis” bisa secara fleksibel dieksploitasi oleh pemerintah untuk memarjinalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakannya.

PVE adalah program yang dimotivasi oleh politik, bukan strategi kontraterorisme. Dan alasan kenapa ia berhasil diterapkan adalah sebagian umat Islam dengan mudah menerima narasi tunggal yang disetir oleh Barat yang berlaku dalam “perang melawan teror”. Narasi yang digunakan terkait dengan kekerasan politik, ekstremisme, radikalasi, dan persoalan Islam/Muslim sangat dipengaruhi oleh *think tanks* AS dan Inggris serta kelompok kebijakan mereka, yaitu bersifat ideologis dan politis.

Hasilnya adalah sebuah kebijakan yang tidak lagi tentang pencegahan kekerasan yang termotivasi oleh politik—yang disebabkan oleh dukungan Barat pada pemerintah yang zalim dan penindasan yang mereka lakukan pada dunia Islam, bukan ideologi—tapi lebih kepada kebijakan untuk mengalahkan ideologi Islam itu sendiri, dengan hanya menerima Islam yang bersahabat bagi nilai-nilai Barat.

Dengan program PVE-nya, Barat berusaha mendefinisikan ulang Islam. Meski dalam retorikanya ingin perdamaian dan persatuan, realitanya mereka justru berusaha memecah belah Islam dengan membuat pengelompokan: Islam moderat dan Islam ekstrim. Padahal, “Islam adalah Islam, dan akan selalu demikian hingga hari kiamat.”

Mungkin, mereka bisa memotong seluruh bunga, namun mereka tidak bisa mencegah datangnya musim semi.

NARASI TUNGGAL PBB: GAGAL DI SURIAH, PBB MEMBUAT PREVENT VIOLENT EXTREMISM

A. SURIAH MENGUAK FAKTA KETIDAKBERDAYAAN PBB

Konflik di Suriah kini memasuki tahun kelima. Jumlah korban semakin meningkat, hingga mendekati 500.000 korban jiwa.¹ Hampir separuh dari penduduk Suriah terpaksa meninggalkan rumahnya. Masyarakat sipil masih harus menghadapi serangan bom barel dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kejam, termasuk penyiksaan dan penahanan puluhan ribu orang. Kehadiran Rusia, sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, pada pertengahan tahun 2015 bukannya meredakan situasi, namun justru semakin memperburuk penderitaan rakyat Suriah. Bagi rakyat Suriah, pengeboman, pembunuhan dan penyiksaan adalah horor yang mereka hadapi setiap hari. Anak-anak harus menghadapi realitas yang sangat keras: seperempat sekolahan di Suriah telah hancur, atau digunakan untuk tujuan lain, memaksa 1,6 juta anak untuk meninggalkan sekolahnya.

Sampai saat ini, dunia masih meraba solusi yang bisa mengakhiri bencana kemanusiaan terbesar pada abad ini tersebut. Tiga resolusi sudah dikeluarkan oleh PBB, rapat pun sudah berulang kali diadakan, namun, belum ada perubahan signifikan yang terlihat.

Pada bulan Februari 2014, PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan no. 2139 yang menyerukan peningkatan akses bantuan kemanusiaan di Suriah, penghentian penahanan yang semena-mena, penculikan, dan penyiksaan.² Pada bulan Juli dan Desember 2014, Dewan Keamanan PBB merilis dua resolusi lagi, yaitu Resolusi 2165 dan 2191 yang memberi otorisasi pada bantuan kemanusiaan ke Suriah dari negara tetangga tanpa harus meminta persetujuan pemerintah Suriah.

Dua tahun sudah berlalu sejak Resolusi 2139 dirilis, rakyat Suriah masih mengalami penderitaan dan pembunuhan yang justru semakin meningkat. Kebutuhan bantuan kemanusiaan meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 2013. Lebih dari 11,6 juta orang kini sangat membutuhkan air bersih, dan hampir 10 juta orang tidak memiliki cukup bekal untuk dimakan. Hampir 6 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan lebih dari 212.000 rakyat Suriah yang hidup dalam wilayah yang terkepung.

Realita tersebut terwakili dengan sangat baik oleh pernyataan Justin Forsyth, pemimpin eksekutif Save the Children: “Di saat para pekerja kemanusiaan mengorbankan kehidupannya untuk memberikan pertolongan dan layanan, jutaan rakyat Suriah masih tak terjangkau, bukan hanya

¹ <http://scpr-syria.org/publications/policy-reports/confronting-fragmentation/>

² <http://www.un.org/press/en/2014/sc11292.doc.htm>

karena pertempuran, tapi juga karena kurangnya dana dan kegagalan Dewan Keamanan PBB.”³

Suriyah mengungkap sebuah fakta tentang ketidakberdayaan Dewan Keamanan PBB di era rivalitas yang tajam hari ini. Karena di Suriyah, sistem di PBB bekerja, tapi tidak untuk rakyat Suriyah.

Dewan Keamanan PBB diberi kekuasaan untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat kepada seluruh anggota PBB. Mereka menjadi polisi dunia dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Untuk itu bayarannya sangat mahal, mereka meminta hak untuk memblokir segala kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan mereka.

Sepanjang konflik Suriyah, banyak warga AS yang mengeluhkan tentang veto yang dilakukan oleh China dan Rusia. Perilaku yang sama sebenarnya juga dilakukan oleh AS, yang seringkali memveto resolusi yang tidak memihak kepentingan Israel. Perlu diingat, tujuh dekade yang lalu, AS dan Uni Soviet sama-sama merengek meminta hak veto bagi anggota Dewan Keamanan. *Privilege* tersebut dianggap sebagai sebuah diskriminasi terhadap negara-negara kecil. Sejak tahun 1975, AS telah melakukan veto sebanyak 73 kali, terbanyak di antara anggota Dewan Keamanan yang lain.⁴

Apa yang terungkap dari konflik di Suriyah tentang PBB adalah bahwa sistem tersebut “tidak bermoral”, bahkan saat ia “berfungsi” sekalipun.⁵ Ia dipasang untuk menjalankan kepentingan *great powers*—dan mengurangi kemungkinan terjadinya perang di antara mereka. Sistem tersebut memberikan sebuah tatanan dasar.

Tapi, tatanan tersebut jauh dari keadilan—sebagaimana yang kita lihat di Suriyah, dan gagal untuk menghadirkan perdamaian. Di Suriyah, persoalan semakin rumit saat masing-masing anggota Dewan Keamanan terpecah dengan kepentingannya masing-masing.

Untuk alasan tersebut, tidak mengejutkan jika dikatakan bahwa PBB secara sistematis telah membuat gagal Suriyah. Situasi tersebut tidak akan berubah. Suriyah menguak kesia-siaan usaha untuk mencapai kesepakatan di antara pihak Dewan Keamanan yang terpecah belah. Karenanya, Stewart M. Patrick, direktur Program on International Institutions and Global Governance di the Council

on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa bersandar pada badan yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda justru akan membawa kita kepada sebuah kegilaan.⁶

Pada bulan Maret 2015, dua puluh organisasi kemanusiaan—termasuk Oxfam, Save the Children, dan World Vision—merilis

laporan yang mengukur dampak Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam melindungi dan melayani rakyat sipil di Suriyah.⁷ Hasilnya, laporan tersebut memberi nilai F alias *fail* (gagal) bagi Dewan Keamanan PBB dalam usaha mereka untuk menghentikan pembantaian dan menolong mereka yang membutuhkan. Laporan tersebut menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB berulang kali gagal untuk mengimplementasikan resolusinya di Suriyah.

Laporan tersebut memberi nilai pada Dewan Keamanan PBB dalam empat kriteria: perlindungan

“Kata-kata Dewan Keamanan PBB kini hanyalah omong kosong. Apa manfaatnya sebuah resolusi bagi seorang ibu di Suriyah yang rumahnya dibom dan anak-anak yang kelaparan jika resolusi tersebut diabaikan?”

3 <http://www.itv.com/news/2015-03-12/civilians-in-war-torn-syria-have-been-let-down-by-the-united-nations-security-council-report-finds/>

4 <http://research.un.org/en/docs/sc/quick>

5 <http://www.newsweek.com/syrias-misery-evidence-un-broken-421696>

6 <http://blogs.cfr.org/patrick/2016/01/28/the-tragic-irony-of-syria-the-system-worked/>

7 "Failing Syria: Assessing The Impact Of UN Security Council Resolutions In Protecting and Assisting Civilians In Syria", Maret 2015, <http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/Failing%20Syria%2C%20English.pdf>

masyarakat sipil, perkembangan politik, dukungan finansial pada respon kemanusiaan, dan akses bantuan kemanusiaan. Pada tiga kriteria pertama, Dewan Keamanan PBB memperoleh nilai F alias gagal, sedangkan pada kriteria terakhir, yaitu akses bantuan kemanusiaan, nilainya D yang berarti tidak ada perkembangan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut hanya berhentidiataskertas, PBB gagal menerjemahkannya ke dalam sebuah realitas di lapangan. Andy Baker, manajer program Oxfam di Suriah mengatakan, **“Kata-kata Dewan Keamanan PBB kini hanyalah omong kosong. Apa manfaatnya sebuah resolusi bagi seorang ibu di Suriah yang rumahnya dibom dan anak-anak yang kelaparan jika resolusi tersebut diabaikan?”** Bagi seorang pemuda Suriah berusia 20 tahun, realitas di balik “omong kosong” tersebut adalah kesuraman: “Susah mendapatkan air dan harganya sangat mahal. Harga makanan meningkat dua kali lipat dan tidak ada listrik dalam lima bulan terakhir.”⁸

Hari ini menjadi bukti bahwa PBB tidak berdaya untuk menghentikan perang di Suriah. Pada bulan Juni 2015, Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, mengatakan bahwa “dunia seharusnya malu karena tiga tahun setelah negara-negara besar di dunia menyetujui *blueprint* di Jenewa untuk membawa kedamaian di Suriah, penderitaan rakyat Suriah justru semakin dalam dan negara tersebut kini berada di tepi kehancuran.”⁹

Mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, pun “terkejut” dengan meningkatnya eskalasi kekerasan yang terjadi di sana.¹⁰ **Namun, sejatinya hal yang paling mengejutkan adalah semua orang terkejut dengan kegagalan PBB tersebut. PBB adalah organisasi yang cacat yang tidak mampu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ia nyatakan, apalagi memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai**

pihak yang tertindas dan mengalami penderitaan di seluruh dunia—yang menjadikan PBB sebagai harapan terakhir mereka.

PBB didirikan dengan tujuan sebagai berikut:¹¹

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan utama untuk mencegah perang dunia III, dan sampai hari ini perdamaian dan keamanan masih menjadi kegelisahan yang sangat tinggi bagi PBB.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa berdasarkan prinsip kesamaan hak dan *self-determination* (hak untuk menentukan nasib sendiri) bagi rakyatnya. Tujuan kedua ini semakin menunjukkan kekusutan PBB—sejumlah besar negara anggota PBB tidak merepresentasikan *self-determination* dari rakyatnya. Begitu juga PBB, yang tidak memberikan usaha yang signifikan untuk meminta kepada anggotanya agar menjalankan *self-determination* bagi rakyat mereka. Lima puluh dua dari 165 anggota PBB adalah rezim otoriter. Suriah, adalah salah satu negara yang mewakili kepentingan satu orang, yaitu Bashar Assad, bukan 20 juta penduduk Suriah. Artinya, “hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa” dilakukan berdasarkan penghargaan atas hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dari satu orang di sepertiga negara anggota, bukan *self-determination* rakyatnya.
3. Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional dan mempromosikan HAM serta kebebasan fundamental lainnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, PBB mempunyai catatan yang kurang begitu baik. Alasannya cukup jelas, jika 1/3 negara anggota adalah rezim otoriter yang kurang menghargai HAM atau kebebasan

8 <http://www.oxfamamerica.org/explore/stories/calling-on-the-global-community-to-stand-with-syria-after-syrians-faced-the-worst-year-yet/>

9 <http://bigstory.ap.org/article/89c659ee6da44dc3a8e00c2f490bb4d2/un-world-should-be-ashamed-failure-end-syria-conflict>

10 <http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120409/world/Annan-shocked-by-violence-as-Syria-delays-its-pullback.414713>

11 <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/>

fundamental, berapa banyak kerjasama yang bisa dicapai untuk mengatasi masalah tersebut?

4. Menjadi pusat dalam melakukan harmonisasi kegiatan-kegiatan negara anggota untuk mencapai tujuan akhir bersama.

Dewan Keamanan PBB adalah tempat di mana kekuatan utama PBB terletak, dan merekalah kanker paling berbahaya yang menggerogoti tubuh PBB. Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima negara: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Bagaimana mereka mendapatkan kursinya dalam Dewan Keamanan PBB? Anggota Dewan Keamanan adalah negara pemenang Perang Dunia II. Pemenang waktu itu, selain AS, Inggris, dan Prancis, adalah Republik China dan Uni Soviet, bukan Republik Rakyat China dan Rusia. Republik China adalah negara yang dikudeta oleh Republik Rakyat China, dan akhirnya mereka menjadi Taiwan saat ini. Sedangkan Rusia mewarisi kursi di Dewan Keamanan PBB pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Apa yang terungkap dari konflik di Suriah tentang PBB adalah bahwa sistem tersebut “tidak bermoral”, bahkan saat ia “berfungsi” sekalipun. Ia dipasang untuk menjalankan kepentingan great powers—dan mengurangi kemungkinan terjadinya perang di antara mereka. Sistem tersebut memberikan sebuah tatanan dasar. Tapi, tatanan tersebut jauh dari keadilan—sebagaimana yang kita lihat di Suriah, dan gagal untuk menghadirkan perdamaian.

Dalam 65 tahun terakhir, anggota Dewan Keamanan justru menjadi kekuatan penindas dengan memberikan dukungan kepada rezim otoriter di seluruh dunia. Rusia dan China membentengi Korea Utara, Iran, dan Suriah; AS menjadi *backing* pemerintah otoriter Mesir. Dengan kondisi seperti itu, tujuan kedua dan ketiga tidak mungkin untuk tercapai. **PBB pun menjadi semacam *superhero* yang berkonsultasi dengan para penjahat sebelum memutuskan apakah perlu untuk menyelamatkan sebuah kota.**

Setelah kesulitan mencari titik temu di Suriah, tak seorang pun seharusnya masih berkhayal bahwa PBB akan memajukan hak asasi manusia, kemerdekaan, dan *self-determination*. Fakta bahwa misi utama PBB adalah stabilitas dan perdamaian berarti bahwa mereka akan selalu bertentangan secara diametris dengan penyebab kemerdekaan di seluruh dunia, karena dalam banyak kasus, termasuk di Suriah, kemerdekaan dan *self-determination* hanya bisa dicapai melalui perang. **Perdamaian dan kemerdekaan seringkali adalah konsep yang eksklusif secara mutual. Dan sepanjang sejarah, seringkali revolusi dan perang sipil yang memberi jalan bagi kemerdekaan dan kebebasan.**

Stabilitas berarti mempertahankan *status quo*, dan bagi sepertiga masyarakat dunia, *status quo* berarti hidup di bawah rezim yang otoriter.

B. PLAN OF ACTION PBB UNTUK MENCEGAH VIOLENT EXTREMISM

Setelah berulang kali mengeluarkan resolusi untuk mengatasi konflik di Suriah, dengan nilai F yang mereka dapatkan, PBB mengeluarkan *Plan of Action to Prevent Violent Extremism*. Tanpa melihat secara keseluruhan aktor yang terlibat dalam konflik, termasuk anggota Dewan Keamanannya yang terlibat dalam konflik di Suriah, PBB justru berfokus pada satu pihak saja, dari sekian banyak pihak yang terlibat, yaitu kelompok yang mereka anggap ekstrim.

Mereka menganggap kelompok radikal Islam sebagai ancaman terbesar bagi tatanan dunia dan nilai-nilai Barat. Ban Ki-Moon menyebutnya sebagai “momok di era kita”.¹² Untuk melawannya, segala upaya pun dilakukan, mulai dari serangan darat, serangan udara, pembunuhan, penyiksaan, penahanan secara masif, hingga sanksi ekonomi. Yang terbaru, mereka membuat pendekatan lain yang diberi nama “Prevent Violent Extremism” untuk mencegah tersebarnya paham-paham ekstrimisme. Langkah ini diambil karena program deradikalisasi, yang mencoba untuk mengubah pikiran orang-orang yang sudah radikal, dinilai tidak efektif.¹³

Prevent Violent Extremism (PVE) sendiri sudah lama menjadi agenda kebijakan pemerintah AS, namun program tersebut kembali menarik perhatian dunia dalam beberapa bulan terakhir. *Plan of Action*

PBB pun menjadi semacam superhero yang berkonsultasi dengan para penjahat sebelum memutuskan apakah perlu untuk menyelamatkan sebuah kota.

dari Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, untuk mencegah ekstremisme kekerasan (*violent extremism*) menjadi katalis utama bagi terbarukannya fokus tersebut. Pada tanggal 15 Januari 2016, *Plan of action* tersebut dipresentasikan di hadapan Majelis Umum PBB.¹⁴ Pada tanggal 12 Februari 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang “menerima inisiatif Sekjen PBB, dan memberi perhatian pada *Plan of Action to Prevent Violent Extremism*.” Beberapa negara anggota diundang dalam forum tersebut, termasuk Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Amerika, Serikat, Denmark, dll.

Banyak tanggapan dari masing-masing negara dalam forum tersebut. Michele J. Sison, utusan dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa “adopsi resolusi [dari *Plan of Action* tersebut] memberikan pesan yang kuat bahwa PBB bersatu melawan ekstremisme kekerasan... Mengalahkan terorisme di medan pertempuran tidaklah cukup kecuali jika komunitas internasional juga memberi perhatian pada penyebab dasar aksi ekstremisme tersebut.”¹⁵

Amit Heumann, dari Israel, mengatakan bahwa “Kita tidak boleh memperdaya diri sendiri—ancaman paling riil dan mendasar adalah ideologi ekstremis itu sendiri. Melawan hasutan dan radikalisme adalah salah satu alat yang paling efektif.” Dia juga menegaskan perlunya mempromosikan pendidikan yang mengajarkan perdamaian, bukannya kebencian; toleransi, bukannya kekerasan.” Untuk itu, ia juga menegaskan bahwa “kegaduhan di belakang tidak boleh membajak topik yang penting ini.”¹⁶

Sedangkan perwakilan dari Indonesia, Muhammad Anshor, menyatakan bahwa “ekstremisme kekerasan seringkali membawa kepada terorisme... *Plan of Action* akan membantu negara anggota dalam memperkuat strategi nasionalnya untuk mengatasi ekstremisme dan meningkatkan program-program untuk

12 <http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/70/675>

13 John Greenmayer, IO Sphere, Summer 2015, h. 3

14 <http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=9388>

15 <http://www.un.org/press/en/2016/ga11760.doc.htm>

16 <http://www.humanrightsvoces.org/site/documents/?d=14653&id=17899>

Perdamaian dan kemerdekaan seringkali adalah konsep yang eksklusif secara mutual. Dan sepanjang sejarah, seringkali revolusi dan perang sipil yang memberi jalan bagi kemerdekaan dan kebebasan.

mengimplementasikan Strategi Kontraterorisme Global PBB.” Ia juga menambahkan bahwa “Kurangnya penghormatan terhadap nilai yang berbeda dan stigmatisasi adalah dua tantangan utama untuk mengatasi fenomena tersebut.”¹⁷

Lain lagi dengan tanggapan dari utusan Malaysia, Raja Reza Bin Raja Zaib Shah, yang lebih mengkhawatirkan tentang **“meningkatnya intoleransi dan diskriminasi terhadap umat Islam, yang berdampak pada meningkatnya Islamophobia, sebuah fenomena yang merupakan sebuah penghinaan terhadap hak asasi manusia dan harga diri umat Islam.”**¹⁸

Begitu juga dengan perwakilan dari Pakistan, Maleeha Lodhi, yang memberi perhatian pada “kurang jelasnya definisi yang disepakati tentang ‘terorisme’ dan ‘ekstremisme kekerasan.’” Menurutinya, “Ketidakadilan yang dilakukan terhadap masyarakat yang berada dalam penjajahan asing, penolakan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), sengketa internasional yang telah lama dan belum terselesaikan, campur tangan urusan dalam negeri suatu negara, pelanggaran yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam Piagam PBB telah menciptakan kondisi yang justru dimanfaatkan oleh para ekstremis.” Dia juga menyesalkan sejumlah elemen yang penting—seperti stereotip negatif, stigmatisasi, diskriminasi,

dan intoleransi—yang diabaikan dalam *Plan of Action* ini. Selain itu, menurutnya, “Xenophobia, terutama Islamophobia, sangat meningkat di Barat, dan sejauh ini tidak terlalu diperhatikan. Padahal beberapa politisi tak bermoral membangun keberuntungan politiknya dengan menyebarkan rasa takut dan miskarakterisasi secara sengaja terhadap orang dari agama atau budaya lain.”¹⁹

Perdebatan dan perbedaan tanggapan dari beberapa negara tentang *Plan of Action* tersebut membuat Majelis Umum PBB memutuskan untuk “memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap *Plan of Action to Prevent Violent Extremism*, dimulai pada review Strategi Global Kontraterorisme pada bulan Juni 2016 dan juga forum-forum lainnya yang relevan.”²⁰

Globalisasi program PVE ini tidak lepas dari usaha pemerintah AS sebagai penggerak utamanya. Sarah Sewell, salah satu pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri AS, mengatakan bahwa “dalam dua tahun terakhir, pemerintah Obama secara dramatis mencoba mengangkat PVE dalam agenda internasional.”²¹ USAID dan badan pemerintah AS lainnya juga telah mengambil langkah untuk memasukkan PVE dalam program-programnya.²² Ia juga mengatakan bahwa langkah globalisasi PVE ini dimotivasi oleh pelajaran yang mereka dapatkan dari satu dekade lebih perang melawan teror.

Ban Ki-Moon sendiri mengakui bahwa “pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa kebijakan dengan pandangan jangka pendek, kepemimpinan yang gagal, pendekatan dengan kekerasan, dan fokus tunggal hanya pada tindakan keamanan, serta pengabaian terhadap hak asasi manusia seringkali membuat segalanya lebih buruk.”

17 <http://www.un.org/press/en/2016/ga11760.doc.htm>

18 <http://www.humanrightsvoces.org/site/documents/?d=14692&id=17938>

19 <http://www.humanrightsvoces.org/site/documents/?d=14655&id=17901>

20 <http://www.un.org/press/en/2016/ga11760.doc.htm>

21 <http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/other/SewallRemarks20151120.pdf>

22 <https://www.usaid.gov/countering-violent-extremism>

Dalam Plan of Action tersebut, mereka mendeskripsikan beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhnya *violent extremism*, yaitu:

1. Kurangnya peluang sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, dan lain-lain.
2. Marjinalisasi dan diskriminasi
3. Tata pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan aturan hukum atas nama keamanan. Korupsi, kebijakan yang represif, profiling dan pengawasan pada komunitas tertentu adalah salah satu contohnya.
4. Konflik yang lama tidak terselesaikan
5. Radikalisasi di penjara

Plan of Action memberikan lebih dari 70 rekomendasi kepada seluruh negara anggota dan juga sistem PBB untuk mencegah penyebaran ekstremisme kekerasan.²³ PBB juga merekomendasikan negara anggotanya untuk mengadopsi inisiatif yang ada dalam *plan of action* tersebut yang berfokus pada tujuh area kunci untuk menangkal *violent extremism*, yaitu:

a. Dialog dan Pencegahan Konflik

1. Memastikan bahwa jika kondisi memerlukan tindakan militer untuk melawan kelompok ekstrim, respon tersebut harus tetap sesuai dengan hukum internasional.
2. Segera melibatkan pihak yang bertikai dan aktor regional untuk mencari solusi.
3. Menyerukan anggota kelompok *violent extremism* untuk meninggalkan kelompoknya dengan memberikan peluang pendidikan dan ekonomi.
4. Mengeksplorasi peluang untuk mencari mekanisme resolusi alternatif dari pertikaian yang terjadi.

"meningkatnya intoleransi dan diskriminasi terhadap umat Islam, yang berdampak pada meningkatnya Islamophobia, sebuah fenomena yang merupakan sebuah penghinaan terhadap hak asasi manusia dan harga diri umat Islam."

– Raja Reza Bin Raja Zaib Shah

5. Melibatkan pemimpin agama untuk memberikan panggung bagi dialog antar agama yang mempromosikan toleransi dan sikap saling memahami.
6. Melindungi warisan perbedaan budaya dan agama dari upaya kelompok ekstrim untuk menghancurkan manuskrip, objek, dan situs yang menjadi symbol pluralism dan toleransi.
7. Mengadakan dialog regional dan nasional untuk mencegah *violent extremism* dengan berbagai pihak, mulai dari melibatkan pemuda, persamaan gender, pelibatan kelompok yang termarginalisasi, peran pemerintah daerah, dan jangkauan yang lebih luas melalui media sosial.

b. Memperkuat Good Governance, HAM, dan Aturan Hukum

1. Melakukan review atas semua peraturan, kebijakan, strategi, dan praktik yang dilakukan untuk mencegah *violent extremism* untuk memastikan bahwa semua sudah menghormati HAM dan aturan hukum.
2. Memberikan keadilan kepada semua orang.
3. Mengembangkan penyediaan layanan dasar yang tidak diskriminatif.
4. Memastikan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang mencolok, termasuk

23 https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org/counterterrorism.ctitf/files/plan_action.pdf

kejahatan perang, melalui prosedur pengadilan yang baik.

5. Mereformasi bingkai hukum nasional dan sistem penjara untuk memastikan keamanan penghuninya dan mencegah radikalisasi di penjara.
6. Membuat program *disengagement*, rehabilitasi, dan konseling bagi orang yang terlibat dengan *violent extremism*.
7. Mencegah penyalahgunaan lembaga pendidikan, budaya, dan agama oleh kelompok teroris dan pendukungnya; dengan melakukan tindakan yang tepat untuk melawan segala bentuk intoleransi atas nama agama atau keyakinan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kurikulum formal dan non-formal dari lembaga pendidikan, buku ajar, dan metode pengajaran mereka.
8. Memastikan bahwa segala bentuk pembatasan *freedom of expression* didefinisikan dengan jelas dan memenuhi uji tiga bagian: legalitas, proporsionalitas, dan keperluan.

c. Pelibatan Komunitas

9. Mengembangkan strategi pelibatan masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk mencegah munculnya *violent extremism*.
10. Mengembangkan program *mentorship* yang berbasis lokal dan keluarga.
11. Mengadopsi program dan model kebijakan yang berorientasi pada komunitas yang berusaha menyelesaikan persoalan lokal dengan bekerjasama dengan komunitas.
12. Memberikan layanan medis, psikologis, dan hukum kepada komunitas yang memberikan perlindungan kepada korban *violent extremism*.
13. Mempromosikan diskusi atau tulisan yang membahas tentang penyebab *violent extremism*, termasuk terus berlangsungnya pelanggaran HAM.

d. Penguatan Pemuda

1. Mendukung dan meningkatkan peran serta pemuda dalam aktivitas yang bertujuan untuk mencegah *violent extremism*.
2. Mengintegrasikan pemuda dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal dan nasional.
3. Membantu mengembangkan rasa percaya di antara para pembuat keputusan dan para pemuda.
4. Mengembangkan program mentoring nasional untuk para pemuda.
5. Memastikan dana yang didedikasikan untuk PVE juga ada alokasi untuk proyek yang terkait dengan kebutuhan para pemuda.

e. Persamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Lakukan investasi dalam riset dan pengumpulan data yang sensitif gender terkait dengan peran wanita dalam *violent extremism*.
2. Libatkan wanita dalam badan keamanan dan penegakan hukum, sebagai usaha pencegahan terorisme.
3. Bangun kapasitas wanita untuk terlibat dalam usaha pencegahan *violent extremism*.

f. Pendidikan, Pengembangan Skill, dan Kemudahan Lapangan Kerja

1. Pendidikan di sini meliputi pengajaran untuk menghormati HAM dan perbedaan, mengembangkan cara berpikir kritis, mengembangkan perilaku dan skill *socioemotional* yang berkontribusi pada toleransi dan sikap hidup berdampingan secara damai.
2. Investasi dalam pendidikan, terutama usia dini (3-8 tahun), untuk memastikan bahwa seluruh anak mempunyai akses pendidikan yang berkualitas tinggi.

3. Implementasikan program pendidikan yang mempromosikan “global citizenship” dan eksplorasi sarana untuk memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah, buku ajar, dan materi pengajaran. Bangun kapasitas guru untuk mendukung agenda ini.
4. Kerjasama dengan otoritas lokal untuk menciptakan peluang ekonomi dan sosial.
5. Sediakan opsi karir tambahan bagi para pemuda dengan mengembangkan kultur wirausaha.

g. Komunikasi Strategis, Internet, dan Media Sosial

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi nasional, bekerjasama dengan perusahaan social media, untuk melawan narasi *violent extremism*.
2. Menyerukan riset tentang hubungan antara penyalahgunaan internet dan media sosial oleh kelompok *violent extremism* dan faktor yang menyebabkan satu individu tertarik pada *violent extremism*.
3. Promosikan usaha dari kalangan akar rumput untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi, pluralism, dan sikap saling memahami.
4. Memastikan bahwa peraturan hukum nasional melindungi kebebasan untuk beropini, berekspresi, pluralism, dan perbedaan di media.
5. Kuatkan para korban *violent extremism* dengan menyediakan forum online yang bisa membuat mereka bisa bercerita tentang kisah mereka.
6. Lindungi para jurnalis, yang memainkan peran kunci dalam masyarakat demokrasi, dengan memastikan investigasi yang cepat, tepat, dan menyeluruh terkait dengan ancaman terhadap mereka, dan himbau para jurnalis untuk bekerja bersama mengembangkan pelatihan media dan etika perilaku yang menghargai toleransi.

C. CACAT DALAM PROGRAM *PREVENT VIOLENT EXTREMISM* (PVE)

Plan of action tersebut bukan tanpa kritikan, banyak lubang cacat di sana yang membuat sejumlah akademisi memberikan catatan dan kritikan. Naz K. Modirzadeh, Direktur Harvard Law School Program on International Law and Armed Conflict (PILAC), menyatakan bahwa *plan of action* tersebut tidak memberi diagnosa, tapi justru banyak memberi ketentuan; skeptis pada pendekatan kontraterorisme saat ini, tapi justru mendukung sebagian besar pendekatan yang sebenarnya sedang dilakukan.²⁴

Modirzadeh menulis beberapa cacat fatal yang ada dalam *Plan of Action* tersebut:

Pertama, tidak mendefinisikan apa itu *violent extremism*, bahkan PBB menyerahkan definisi tersebut pada negara masing-masing yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan represinya atas rakyatnya.

Di Inggris, misalnya, mereka mendefinisikan “ekstremisme” secara sangat meluas, yaitu “penentangan aktif terhadap nilai-nilai *British* yang fundamental, termasuk demokrasi, aturan hukum, kebebasan individu, saling menghormati, dan toleransi antar keyakinan yang berbeda.”

Definisi ini bahkan ditentang oleh Kepala Polisi Manchester, Sir Peter Fahy, dengan menganggapnya sebagai definisi yang sangat samar, karena ia menggiring polisi menjadi “polisi pikiran”, yang membuka pintu kecurigaan bagi setiap orang yang mengemukakan ide kritis terhadap kebijakan Inggris.²⁵

Plan of Action mencampuradukkan antara “Violent Extremism”, “Terrorism”, dan “Extremism”. Manifestasi apa saja yang termasuk dalam *violent extremism*? Perilaku apa yang dimaksud sebagai *violent extremism*? Apakah *violent extremism* terkait

²⁴ <https://www.lawfareblog.com/if-its-broke-dont-make-it-worse-critique-un-secretary-generals-plan-action-prevent-violent-extremism>

²⁵ <http://www.theguardian.com/uk-news/2014/dec/05/peter-fahy-police-state-warning>

dengan taktik, motif, ideologi, pesan atau aspirasi? *Plan of Action* gagal untuk menjelaskannya.

Kedua, tidak mampu memberi bukti yang meyakinkan tentang penyebab *violent extremism*. Tidak banyak bukti yang mendukung penyebab *violent extremism* yang diklaim oleh *Plan of Action*. *Plan of Action* sendiri menjelaskan bahwa tidak ada konsensus di antara para ahli tentang “apa yang menyebabkan *violent extremism*” dan tidak ada bukti kuantitatif tentang apa yang menyebabkan seseorang menjadi ekstrimis atau teradikalisasi. Kesimpulan ini juga dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rand Corporation untuk pemerintah AS²⁶ dan studi yang dilakukan oleh MI5 Inggris.²⁷ Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada konsensus tentang faktor-faktor yang bisa mengubah pikiran ekstrim menjadi sebuah tindakan kinetik. Tentu saja, konsensus ini akan makin sulit dicapai jika definisi saja tidak jelas.

Plan of Action menjelaskan bahwa negara yang gagal mengatasi kemiskinan, kurangnya lapangan kerja untuk pemuda, korupsi, pelanggaran HAM atas nama keamanan nasional akan lebih rentan terhadap *violent extremism*. Namun *Plan of Action* gagal menjelaskan hubungan sebab akibat yang aktual antara tindakan negara yang buruk, kondisi kehidupan yang miskin, dengan *violent extremism*.

Bagaimana *Plan of Action* bisa menjelaskan mengapa anggota masyarakat lain yang jauh lebih banyak yang berada dalam kondisi seperti di atas tidak menjadi *violent extremist*? *Plan of Action* sendiri mengakui perlunya penelitian dan kebijakan yang berbasis bukti. Jika buktinya sangat lemah, ketentuan dan aturan yang direkomendasikan harusnya juga terbatas.

Ketiga, *Plan of Action* menentukan sejumlah tindakan yang terprogram, politis, dan institusional dengan dampak yang sangat signifikan. Meski gagal mendiagnosa masalah, *Plan of Action* justru

menentukan sejumlah tindakan terprogram, politis, dan institusional untuk seluruh negara anggota. Banyak rekomendasi *Plan of Action* yang diwajibkan atas negara anggota. Diantara rekomendasi tersebut, banyak diantaranya yang tidak bisa menunjukkan bahwa hal tersebut bisa mengurangi kekerasan, dan seharusnya tidak menjadi domain negara.

Modirzadeh menilai bahwa *Plan of Action* ini berusaha untuk menggerakkan institusi, sumber daya, norma, dan kebijakan berdasarkan pondasi analisis yang lemah.

Keempat, implementasi *Plan of Action* ini akan mengalihkan sumber daya dari usaha keamanan, multilateral, dan kemanusiaan yang sudah ada. *Plan of Action* menegaskan bahwa sumber daya tambahan diperlukan untuk mempromosikan HAM, akuntabilitas, partisipasi demokrasi, keadilan di hadapan hukum. Namun yang perlu dicatat, Arab Saudi dan UEA, sebagai pendana utama PVE, memiliki reputasi sebagai negara yang tidak akuntabel dan tidak demokratis. Sumber daya pada bidang ini terbatas. Sehingga, segala yang diinvestasikan untuk PVE akan mengurangi sumber daya bagi bidang lain. Pertanyaannya: Dana apa yang dipotong demi PVE? Atau dari mana dana baru akan diperoleh untuk PVE?

Kelima, PVE memiliki dampak menyeluruh, di mana ia bisa memasukkan kepentingan yang legal di bawah bendera “menekan *violent extremism*”. *Plan of Action* tidak mendasarkan konsep *violent extremism* pada hukum internasional. Tidak jelas, apakah seluruh aksi *violent extremism* bisa dianggap melanggar hukum, terutama yang terjadi di saat konflik. Namun di saat yang sama, *Plan of Action* berusaha menampakkan diri menghormati hukum internasional sebagai jalan utama untuk menghentikan momok *violent extremism*.

Plan of Action tidak menekankan bahwa negara harus mematuhi hukum internasional dan tidak menyatakan bahwa berakhirnya kekebalan atas pelanggaran hukum internasional merupakan

26 http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG849.pdf

27 <http://www.theguardian.com/uk/2008/aug/20/uksecurity.terrorism1>

tujuan dari mereka. Tapi, *Plan of Action* memandang bahwa pelanggaran hukum internasional sebagai salah satu penyebab *violent extremism*.

Framing ini bisa membawa kepada dua sebab:

- (a) Memberi keuntungan kepada organisasi masyarakat untuk lebih memberi perhatian kepada pelanggaran HAM, kekebalan dari kejahatan perang, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat, seperti: “Hentikan penyiksaan tawanan, atau mereka akan menjadi *violent extremist*”.
- (b) Bisa memberi kemungkinan bahwa aksi yang melanggar hukum bisa dijustifikasi atas nama PVE.

Keenam, seruan *Plan of Action* mengaburkan garis antara aktivitas-aktivitas yang disengaja untuk berbeda. Sekjen PBB menyerukan agar seluruh badan PBB mendedikasikan usahanya untuk melawan penyebab *violent extremism*, termasuk organisasi kemanusiaan. Padahal, usaha kemanusiaan *disetting* berbeda dari usaha keamanan dan pembangunan. Para aktor PBB dan NGO yang menjadi partner akan berada dalam risiko yang sangat tinggi jika mereka diintegrasikan dalam usaha keamanan.

Ketujuh, jika PVE gagal, biaya politik dan keamanannya tidaklah nol. Jika *Plan of Action* diimplementasikan, sebagaimana harapan Sekjen PBB, maka seluruh negara di dunia akan memiliki *National Plan of Action* tentang PVE. Negara akan mengerahkan sumber dayanya untuk usaha ini. Mereka akan membuat hukum baru. Mereka akan mengubah ke manadana pembangunan dan bantuan akan diinvestasikan. Para pejabat mereka akan terus menyorot komunitas, kelompok etnis, atau kelompok agama yang “rentan” terhadap terorisme. Komunitas tersebut akan terus diawasi atas nama PVE. Negara akan meningkatkan usaha untuk membuat orang “lebih moderat”, atau mengajari mereka bahwa ‘teks-teks agama mereka

mempunyai tafsir yang lain dari yang mereka yakini’.

Logika PVE ini justru berpotensi menciptakan para *violent extremist* sebanyak yang berhasil mereka cegah. Ada potensi pukulan balik di sini, dan hal ini harus dipandang serius dalam lingkungan geopolitik saat ini.

D. PENCEGAHAN YANG TIDAK MENCEGAH

Dalam pandangan Human Rights First, pemerintah yang menggunakan respon represif dan melanggar HAM cenderung menghasilkan lebih banyak *violent extremist*. Partner internasional yang terlibat dalam tindakan semacam itu justru akan merusak kepercayaan publik terhadap legitimasi sistem internasional yang lebih luas. Human Rights First mencatat bahwa pendekatan militer terhadap persoalan keamanan berkontribusi pada radikalisasi dan peningkatan kekerasan teror di beberapa negara akhir-akhir ini.²⁸

Kebijakan kontraterorisme nasional yang tidak berakar pada penghormatan HAM akan berisiko kontraproduktif. Saat pemerintah mencekik perbedaan pendapat, membungkam media, mencegah aktivitas legal dari organisasi masyarakat non-kekerasan, mereka tidaklah mengounter ekstremisme, tapi justru memicunya.

Ben Emmerson, Pelapor Khusus PBB Dalam Hal Kontraterorisme dan Hak Asasi Manusia, memperingatkan bahwa program untuk melawan dan mencegah ekstremisme kekerasan mengandalkan teori radikalisasi yang banyak dikritik oleh para akademisi.²⁹ Selain itu, program tersebut juga berbasis pada definisi terorisme yang sulit dipahami. Dampaknya, kebijakan yang diambil negara pun cenderung menstigmatisasi kelompok etnis dan agama. Emmerson menyimpulkan dalam laporan terbaru kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa strategi tersebut mengancam hak asasi manusia yang paling mendasar.

Represi yang timbul dari inisiatif tersebut tidaklah mengejutkan. Akar dari semua itu terdapat pada cacat semantik dan konseptual yang melekat di dalamnya, kata Emmerson. Strategi tersebut didasarkan pada “pemahaman yang simplistik dari proses [radikalisasi] sebagai sebuah jalur pasti kepada *violent extremism* dengan tanda yang bisa

diidentifikasi sepanjang jalur tersebut.” Dalam teori tersebut, jika seseorang berpikiran radikal, pada ujungnya otomatis dia akan menjadi seorang teroris. Padahal, **meski sudah banyak dilakukan riset dengan dana yang sangat besar, “tidak ada data statistik yang otoritatif tentang jalur yang membawa seseorang menjadi radikal.”**

Dalam pernyataan lisan yang disampaikan kepada PBB pada 10 Maret 2016, *American Civil Liberties Union* setuju dengan keprihatinan Emmerson ini. Mereka menyampaikan bahwa,

“Meskipun sudah dilakukan penelitian bertahun-tahun di Amerika Serikat dan di tempat lain, tidak ada jalur yang bisa diidentifikasi yang membawa [seseorang] dari keyakinan menuju kekerasan. Begitu juga, tidak ada indikator yang dapat diandalkan yang bisa mengidentifikasi orang-orang yang mungkin rentan [teradikalisasi]”.³⁰

Pengamatan tersebut juga diverifikasi oleh penelitian ilmiah yang sudah dilakukan selama beberapa dekade dan temuan pemerintah AS sendiri.³¹ Anehnya, meski tidak ada bukti empiris, program ini terus tumbuh lebih luas.

Parahnya, menurut Emmerson,

“Negara cenderung fokus pada pendekatan yang paling menarik bagi mereka, lari dari isu yang lebih kompleks, termasuk isu politik seperti kebijakan luar negeri dan konflik transnasional.” Cara pandang ini menyebabkan sebuah fokus yang menyesatkan, yaitu “ideologi agama sebagai akar dari terorisme dan ekstremisme”. Dampaknya, tindakan represif dan diskriminatif terhadap komunitas umat Islam pun semakin meningkat. Bukannya mencegah, hal ini justru semakin memicu terjadinya ekstremisme.

Ketika teori-teori yang lemah dan tidak dipercaya tersebut bertemu dengan kekuasaan

28 <http://www.humanrightsfirst.org/press-release/un-secretary-general-s-plan-action-violent-extremism-challenges-us-leadership-human>

29 <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx>

30 <https://www.aclu.org/other/interactive-dialogue-special-rapporteur-promotion-and-protection-human-rights-while-counteracting>

31 <http://www.brynmawr.edu/psychology/documents/McCauleyMoskalenko.pdf>

negara, hasilnya sangat diskriminatif. Emmerson menyimpulkan,

“Di atas kertas, hampir semua strategi untuk melawan ekstremisme kekerasan bersifat generik. Namun, dalam prakteknya, mereka cenderung menargetkan kelompok tertentu yang dicap paling ‘beresiko’ tertarik pada ekstremisme kekerasan ... Pendekatan semacam ini bisa sangat diskriminatif dan memberikan stigma berbagai kelompok minoritas, etnis, agama atau adat tertentu.”

Program-program yang sangat bernuansa keamanan semacam ini bisa sangat “membatasi ruang operasi masyarakat sipil... mengkriminalisasi hak yang paling dasar untuk bisa bebas berbicara... Mereka juga membenarkan tindakan kejam kepada para pengungsi dan pencari suaka, serta memotong kebebasan berinternet.”

Sementara itu, penargetan pada anak-anak dan sekolah, sebagaimana yang sudah dipraktikkan di Inggris dan AS, “dapat menyebabkan murid dan siswa untuk melakukan *self-censor* dalam rangka untuk menghindari cap ‘ekstrimis’; membuat guru dan staf sekolah lainnya untuk melihat murid dan siswa sebagai potensi ancaman, atau menghindari membahas isu-isu tertentu atau mengundang pembicara tamu yang pandangannya mungkin kontroversial.”

Catatan dari Emmerson ini sangat penting, kata Faiza Patel, co-direktur Program Kebebasan dan Keamanan Nasional di Brennan Center for Justice, karena “sampai sekarang, **apa yang kita lihat adalah PBB bergegas cepat menjalankan program PVE tanpa memperhatikan risiko hak-hak asasi manusia.**”³²

Atmosfer ketakutan yang tercipta dari aksi terorisme memang menjadi makanan empuk bagi mitos yang lama tertanam, bahwa masyarakat harus rela mengorbankan beberapa hak asasinya untuk bisa hidup secara aman. Padahal faktanya, seharusnya tidak ada kontradiksi antara keamanan

dan hak asasi manusia.³³ Meski realita bahwa pendekatan militeristik yang merespon kekerasan dengan kekerasan lebih membuat situasi tidak aman, banyak negara yang sering menolak untuk menggali lebih dalam untuk mendiagnosa penyebab utama *violent extremism*. Ketidakadilan, korupsi, kebijakan yang memarginalkan kelompok minoritas, kriminalisasi keluhan politik yang *legitimate*, adalah beberapa faktor yang menyebabkan munculnya *violent extremism*—hal yang diakui sendiri dalam PVE yang dicanangkan oleh PBB. Faktor-faktor tersebut adalah tanda dari sebuah pemerintahan yang buruk (*poor governance*) dan inkubator bagi konflik sosial.

Menurut Youssef Mahmoud, dari *International Peace Institute New York*, ada sejumlah alasan mengapa program PVE susah dipahami, meski dibungkus dengan berbagai retorika yang indah.³⁴ Salah satu alasannya adalah jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan sebuah realitas negara yang mendanai sebagian kelompok radikal untuk tujuan propaganda.

Alasan kedua, **analisis tentang akar penyebab akan membawa kita pada kegagalan strategis dari kebijakan luar negeri Barat, terutama Amerika Serikat. Penjajahan yang mereka lakukan ke negeri Muslim, serta berbagai penghinaan dan eksploitasi yang mereka lakukan, menjadi salah satu pemicu munculnya *violent extremism*.** Dalam bukunya, *the Geopolitics of Emotions*, Dominique Moisi menulis bahwa penghinaan merupakan salah satu emosi kunci yang bisa membantu kita memahami dinamika politik dan geopolitik internasional. Dia mengakui bahwa di dunia Arab dan dunia Islam lah penghinaan paling terasa dilakukan. Ban Ki-Moon sendiri mengakui bahwa keluhan kolektif yang disebabkan oleh penindasan, penghinaan, dan dominasi bisa membakar rasa dendam.³⁵

33 <https://www.opendemocracy.net/opensecurity/nils-mui%C5%BEnieks/security-services-should-not-have-carte-blanche>

34 <https://theglobalobservatory.org/2016/01/countering-violent-extremism-isis-libya-sahel/>

35 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674

32 <http://www.alternet.org/grayzone-project/countries-are-eroding-human-rights-stigmatizing-ethnic-and-religious-groups-under>

Alasan ketiga adalah sekuritisasi kebijakan. **Beberapa negara menjual ketakutan untuk menjustifikasi penambahan anggaran dan peralatan militer dalam rangka melindungi keamanan sebuah rezim, bukan untuk keamanan kemanusiaan.**³⁶ Karenanya, PVE akan terus menjadi program yang susah dipahami hingga fakta geopolitik yang “tidak nyaman” tersebut diakomodir dalam analisis yang dilakukan dalam rangka mencari solusi jangka panjang.

Investigasi yang dilakukan oleh Robert A. Pape pada tahun 2010 menemukan sebuah fakta bahwa 95% serangan bunuh diri dimotivasi oleh penjajahan asing. Dampak radikalisasi dari dukungan Barat pada Israel sudah lama diketahui. Dan pemerintah di negara mayoritas Muslim tak kalah juga dalam membuat kebijakan yang bisa menimbulkan keluhan dari rakyatnya.

Article 19, sebuah organisasi hak asasi manusia di Inggris, bersama dengan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil internasional, melayangkan surat kepada UN Human Rights Council untuk memberi perhatian lebih pada program PVE. Mereka menilai bahwa beberapa rekomendasi dalam program tersebut berisiko memberikan dampak yang sangat negatif pada hak asasi manusia, terutama kebebasan untuk berekspresi.³⁷

Kurangnya definisi “ekstremisme kekerasan” yang disepakati membuka pintu bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lainnya, apalagi jika diperparah oleh bahaya menggabungkan fenomena tersebut dengan “terorisme”. Akibatnya bisa mengarah kepada penerapan tindakan kontraterorisme yang terlalu meluas. Banyak inisiatif yang disebutkan dalam PVE yang berpotensi mengancam hak asasi manusia untuk mendapatkan kesetaraan, kebebasan dari diskriminasi, hak atas privasi,

“Meskipun sudah dilakukan penelitian bertahun-tahun di Amerika Serikat dan di tempat lain, tidak ada jalur yang bisa diidentifikasi yang membawa [seseorang] dari keyakinan menuju kekerasan. Begitu juga, tidak ada indikator yang dapat diandalkan yang bisa mengidentifikasi orang-orang yang mungkin rentan [teradikalisasi]”.

kebebasan berekspresi, berserikat, beragama atau berkeyakinan.

Pemerintah seringkali memberi label “ekstremisme kekerasan” kepada lawan-lawan politik mereka, wartawan dan pembela hak asasi manusia hanya karena mereka menggunakan hak mereka. Inisiatif yang ada dalam PVE dapat memberikan alasan bagi pemerintah untuk meredam kebebasan berekspresi, dan memberangus perbedaan pendapat.

Article 19 juga mempertanyakan dasar bukti atas inisiatif yang ada dalam PVE, yang cenderung mengalienasi masyarakat, memberikan stigma, dan diskriminasi. Mereka menyebutnya sebagai bentuk “soft surveillance”.³⁸

Menurut Richard Atwood, Direktur Bidang Multilateral International Crisis Group (ICG), **katalis utama gerakan yang dianggap *violent extremist* akhir-akhir ini sangat jelas. Ia terletak di dalam kekacauan Timur Tengah: Invasi AS ke Irak, perang sipil di Suriah, penderitaan warga Sunni di masing-masing tempat, eskalasi yang bodoh di Yaman, *chaos* di Libya dan penyebaran senjata pasca tergulingnya Qaddafi, rivalitas antar negara,**

36 <https://www.opendemocracy.net/opensecurity/hammerdown-invitation/security-for-future-in-search-of-new-vision>

37 https://www.article19.org/data/files/Joint_Letter_to_High_Commissioner_PVE.pdf

38 Dilly Hussain, “The Serious Way Forward to ‘Prevent’ Terror in Britain,” Middle East Eye, 27 Januari 2016; <http://www.middleeasteye.net/columns/beginning-end-prevent-716599408>

terutama **Saudi-Iran**. Secara umum, pertumbuhan para ekstrimis adalah buah dari ketidakstabilan, lebih karena krisis berdarah dibanding radikalisis sebelumnya.³⁹

Atwood juga menegaskan bahwa bahaya yang paling tinggi terletak pada asumsi dari *Plan of Action* yang memandang konflik akhir-akhir ini sebagai perlawanan antara pemerintah dengan *violent extremist*. Memang *Plan of Action* menyerukan dialog di antara pihak yang bertikai, namun rencana tersebut menempatkan *violent extremist* di luar arena dialog. Mereka memberikan simpati pada pihak yang berisiko teradikalisasi, namun jijik pada mereka yang sudah teradikalisasi. Jika negara gagal mencegah militan dari teradikalisasi, *Plan of Action* justru menyatakan secara tidak langsung bahwa satu-satunya opsi adalah dengan menghancurkan mereka atau memaksa mereka untuk menyerah.

Dengan demikian, **Sekjen PBB berisiko menjustifikasi tindakan melanggar HAM yang justru ia peringatkan agar tidak dilakukan. Yang lebih parah, program tersebut justru menggoda rezim untuk secara sengaja meradikalisasi suatu gerakan sebagai strategi survivalnya, sebagaimana yang terjadi di Aljazair tahun 1990-an silam.**

“Misil mungkin bisa membunuh teroris, tapi *good governance* bisa membunuh terorisme,” demikian ungkapan dari Ban Ki-Moon. Masalahnya sekarang, apakah pemerintahan negara-negara yang mendukung proyek anti terorisme saat ini sudah menjalankan *good governance* dalam pemerintahannya?

***Violent extremist* mungkin mengerikan, tapi mereka tidaklah unik. Bahkan aksi IS yang dianggap kejam tidaklah kalah dengan kebrutalan rezim Assad dan milisi Syiah. Aturan Al Qaidah yang represif tapi pragmatis di selatan Yaman tidak bisa dianggap lebih kejam dibanding pengeboman dari udara oleh Arab Saudi. Belum lagi sekian jutaan rakyat sipil yang menjadi**

korban invasi AS ke Afghanistan dan Irak. Semua kelompok tersebut bertempur dalam sebuah perang yang mana semua pihak sudah melanggar aturan.

Atmosfer ketakutan yang tercipta dari aksi terorisme memang menjadi makanan empuk bagi mitos yang lama tertanam, bahwa masyarakat harus rela mengorbankan beberapa hak asasinya untuk bisa hidup secara aman.

39 <http://www.crisisgroup.org/en/regions/op-eds/2016/atwood-why-is-the-wolf-so-big-and-bad.aspx>

E. APA YANG DICEGAH?

Meskipun bahayanya mengemuka, inisiatif *Prevent Violent Ertremism* (PVE) telah menjamur di seluruh dunia, seringkali ditandai, dalam bahasa Emmerson, “sebagai sepupu ‘lembut’ dari inisiatif kontraterorisme.”⁴⁰ Pada bulan Januari 2016, Sekretaris Jenderal PBB merilis sebuah *Plan of Action*, menyusul resolusi yang disahkan pada 2014 oleh Dewan Keamanan. Uni Eropa sudah membuat strategi regionalnya, dan banyak negara lain juga telah menerapkan program tersebut.

Di bawah payung PVE, beberapa negara mulai melipatgandakan usaha dan mengadopsi berbagai kebijakan, baik di tingkat nasional maupun regional. Program pendidikan dan pendekatan kultural, seperti pelatihan imam masjid untuk mengounter ajaran radikal, kini menjadi hal yang umum. Beberapa negara mulai memikirkan rencana nasional yang meliputi dialog antar agama dan antar komunal. Selain itu, kampanye untuk meningkatkan *awareness* agar masyarakat terlibat dalam program pencegahan violent extremism juga mulai dilakukan. Sedangkan yang lain, beberapa negara memasukkan penciptaan peluang sosioekonomi dalam strategi PVE-nya.

Prevent Violent Extremism adalah program PBB yang digulirkan untuk mencegah ekstremisme kekerasan dari akarnya. PVE menjadi komponen inti dari strategi kontraterorisme yang lebih luas. Inti strategi ini adalah persepsi bahwa untuk mencegah terorisme, yang mereka lihat sebagai ancaman terbesar di era ini, mereka harus mencegah Muslim yang ‘rentan’ dari teradikalisasi oleh ekstremisme kekerasan. Mereka menganggap ideologi sebagai akar dari terorisme.⁴¹

Dengan strategi ini, komunitas lokal menjadi salah satu area kunci yang harus diaktifkan sebagai

Beberapa negara menjual ketakutan untuk menjustifikasi penambahan anggaran dan peralatan militer dalam rangka melindungi keamanan sebuah rezim, bukan untuk keamanan kemanusiaan.

aktor utama untuk mengatasi tantangan ini.⁴² Pusat dari kebijakan ini adalah untuk “membangun ketahanan” dari komunitas ini dari paparan ide ekstremisme kekerasan. Karena itu, PVE menjadi pendekatan yang lebih ‘lembut’ untuk strategi kontraterorisme yang lebih luas. Dirasa sangat penting, PBB pun merekomendasikan seluruh negara anggota untuk menerapkannya di negara masing-masing.

Alasan yang Salah

Teori yang paling penting yang mendasari strategi PVE adalah teori bahwa dari ‘radikalisasi’ dipandang sebagai “proses dimana orang-orang pada awalnya mendukung terorisme dan ekstremisme kekerasan dan, dalam beberapa kasus, kemudian bergabung dengan kelompok teroris”.⁴³ Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa para ideolog sedang berusaha untuk “mengindoktrinasi anggota masyarakat yang rentan”, yang “berisiko” untuk direkrut ke dalam ekstremisme kekerasan. Proses ini berbasis pada anggapan bahwa orang-orang radikal mengindoktrinasi, mengeksploitasi keyakinan dan ideologi, berdasarkan penafsiran

40 <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx>

41 <http://www.newstatesman.com/blogs/the-staggers/2011/02/terrorism-islam-ideology>

42 Department for Communities and Local Government, ‘Preventing Violent Extremism Pathfinder Fund: Guidance Note for Government Offices and Local Authorities in England (London, Department for Communities and Local Government, 2007)

43 Preventing violent extremism – Winning hearts and minds; and HM Government, ‘Pursue, Prevent, Protect, Prepare: The United Kingdom’s Strategy for Countering International Terrorism (London, HM Government, 2009).

agama yang keliru.⁴⁴ Mereka juga dianggap mengeksploitasi masalah pribadi, keluhan, tidak adanya ketahanan, atau bahkan dukungan terhadap ekstremisme kekerasan dalam sebuah komunitas masyarakat yang ‘rentan’. Singkatnya, orang-orang tersebut pada akhirnya akan percaya pada ide-ide ‘radikal’ dan mendukung ekstremisme kekerasan,⁴⁵ yang berarti bahwa hal tersebut akan mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak.

Setidaknya ada dua alasan untuk berdebat bahwa teori ‘radikalisasi’ tersebut adalah cacat. Pertama, mengutip kata-kata Richards, **“Belum ada gagasan konsisten tentang apa yang dimaksud dengan ‘radikalisasi’...”**⁴⁶ **Konsep yang dijelaskan di atas hanya dijelaskan secara samar dalam strategi PVE, dan bahkan, di Inggris, pejabat senior dari kepolisian yang terlibat dalam program PVE tidak tahu apa arti ‘radikalisasi’.**⁴⁷ **Kurangnya kejelasan konseptual tentang hal ini telah menghasilkan pendekatan yang membingungkan oleh mereka yang terlibat dalam strategi tersebut.**⁴⁸

Radikalisasi tampaknya adalah kata-kata yang berdengung, tanpa ada yang tahu arti sebenarnya. Dan fenomena ini sangat berbahaya bagi jalannya strategi tersebut. Lebih dari pada itu, konsep ini tidak didasarkan pada bukti empiris, tetapi hanya didasarkan pada ‘conventional wisdom’.⁴⁹ Kita, sebagaimana ungkapan Githens-Mazer dan Lambert, tidak dapat memprediksi siapa yang akan menjadi teroris dan siapa yang tidak.⁵⁰

Dalam perdebatan soal ini, dua akademisi memberikan contoh dari Adam bersaudara, Rahman dan Lamine, yang salah satunya berusaha untuk melakukan serangan teror. Lamine, sang kakak,

adalah yang paling ‘radikal’, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Islam, dan, dengan demikian, seharusnya menjadi orang yang nantinya akan melakukan cara-cara kekerasan. Namun, Rahman lah—yang kurang begitu terpengaruh dengan pikiran radikal Islam, tapi lebih bersemangat—yang berusaha untuk melaksanakan aksi terorisme.⁵¹

Karena itu, keliru jika kita menyatakan bahwa ‘radikalisasi’, apapun maknanya, pasti akan mengarah pada kekerasan. Dalam penelitiannya, Horgan menemukan fakta bahwa hanya sedikit teroris yang mengalami *disengagement* yang juga mengalami deradikalisasi, yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara ‘radikalisasi’ dan aksi terorisme.⁵² Karena itu, tidak mungkin, berdasarkan teori ‘radikalisasi’, untuk menjelaskan mengapa beberapa orang menggunakan sarana terorisme dan yang lainnya tidak.

Ungkapan yang lebih keras disampaikan oleh Marc Sageman, psikiater forensik dan mantan pejabat CIA, dalam review-nya pada tahun 2014 yang dipublikasikan di *Terrorism and Political Violence*.

“Meski sudah lebih dari satu dekade didanai oleh pemerintah dan ribuan pendatang baru dalam riset terorisme, kita tidak semakin dekat dalam menjawab pertanyaan sederhana, “Apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan politik?”⁵³

Dengan demikian, hanya berfokus pada ‘radikalisasi’ berpotensi mengabaikan penyebab penting dari ekstremisme kekerasan. Seperti yang akan kita lihat di bagian berikutnya, selain terlalu berfokus pada penyebab yang salah dari terorisme, PVE juga berfokus pada orang yang salah.

44 Preventing violent extremism – Winning hearts and minds’, h. 10

45 ‘Pursue, Prevent, Protect, Prepare’, p. 82

46 Richards, A. ‘The problem with ‘radicalization’: the remit of ‘Prevent’ and the need to refocus on terrorism in the UK’. *International Affairs*, 87:1 (2011), hal. 143-152,

47 Richards, ‘The problem with ‘radicalization’’, hal. 152.

48 Idem, hal. 143

49 Githens-Mazer, J. and Lambert, R. ‘Why conventional wisdom on radicalization fails: the persistence of a failed discourse’. *International Affairs*, 86:4 (2010), hal. 889-901

50 Githens-Mazer and Lambert, ‘Why conventional wisdom on radicalization fails’, hal. 893.

51 idem, hal. 892-897.

52] Horgan, J. ‘Individual disengagement: A psychological analysis’, in *Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement*, edited by Tore Bjørgo and John Horgan (Abingdon, Routledge, 2009), hal. 17-29,

53 <https://www.lawfareblog.com/readings-marc-sageman-stagnation-terrorism-research>

Orang yang Salah

Dalam praktik yang sudah terjadi di beberapa negara, PVE cenderung memfokuskan strategi kontraterorismenya pada kelompok yang salah, yaitu menargetkan *semua* Muslim dan *hanya* Muslim. Di Inggris, Program PVE sangat banyak ditentang, bahkan oleh parlemen Inggris sendiri.⁵⁴ Alasannya, mereka cenderung menargetkan dan mengkriminalisasi komunitas Muslim secara eksklusif. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan “situasi di mana masyarakat Muslim menolak dan secara aktif mengutuk ekstremisme kekerasan dan berusaha untuk melemahkan dan mengisolasi ekstrimis kekerasan”.⁵⁵ Ini jelas menunjukkan bahwa semua Muslim diharapkan berperan dalam mencegah ekstremisme, permintaan yang tidak diarahkan kepada segmen lain di dunia.

Selain itu, tujuan inti dari strategi adalah untuk “melakukan perubahan sikap yang nyata di kalangan umat Islam ...”.⁵⁶ Terakhir, dana juga didistribusikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan jumlah umat Islam di daerah mereka.⁵⁷ Argumen ini menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa Muslim sebagai ekstremis paling kejam,⁵⁸ dan mereka berniat untuk melakukan perubahan perilaku pada seluruh umat Islam. Hal ini dibuktikan oleh cara pandang pemerintah Inggris yang menganggap bahwa semua Muslim Inggris bertanggung jawab atas apa pun yang dilakukan oleh minoritas kecil Muslim.

Selain melihat semua Muslim sebagai pihak yang bertanggung jawab akan terorisme, PVE juga memberi label semua Muslim sebagai elemen yang berpotensi “berisiko” menjadi ekstremis, sebagaimana yang disampaikan dalam laporan

“Meski sudah lebih dari satu dekade didanai oleh pemerintah dan ribuan pendatang baru dalam riset terorisme, kita tidak semakin dekat dalam menjawab pertanyaan sederhana, “Apa yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan politik?”

Institute for Policy Research and Development.⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa ada keyakinan bahwa semua Muslim berpotensi berbahaya. Semua faktor tersebut berkontribusi pada kelemahan utama strategi pemerintah untuk mencegah ekstremisme kekerasan, yaitu dengan menyatakan bahwa semua Muslim mungkin ‘berisiko’ menggunakan cara-cara kekerasan, pemerintah Inggris menciptakan ‘*suspect community*’, yang kemungkinan bisa mengalienasi umat Islam, dan menciptakan keyakinan di kalangan penduduk secara keseluruhan bahwa umat Islam berbahaya.

Masalah lain yang ada pada strategi PVE adalah bahwa ia mencoba untuk mencegah ekstremisme kekerasan hanya dari anggota masyarakat Muslim,⁶⁰ dan mengabaikan kelompok-kelompok ekstremis lainnya.⁶¹ Mereka hanya fokus pada ‘terorisme yang terinspirasi oleh Al-Qaidah’ didasarkan pada argumen bahwa bentuk terorisme ini adalah ancaman terbesar bagi Inggris. Namun, ini adalah anggapan yang sangat dipertanyakan, mengingat statistik resmi dari lembaga penegak hukum Uni Eropa, Europol, menunjukkan bahwa **antara tahun**

54 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8593862.stm

55 ‘PVE Pathfinder Fund’, hal. 3.

56 Idem, hal. 7

57 Kundani, A. ‘Spooked! How not to prevent violent extremism’ (London, Institute of Race Relations, 2009), hal. 12-14.

58 Cf. Blears, H., dikutip dalam Home Affairs Committee, ‘Terrorism and Community Relations’, hal. 46.

59 Institute for Policy Research and Development, dikutip dalam Communities and Local Government Committee, ‘Preventing Violent Extremism: Sixth Report of Session 2009-10: Report (London, House of Commons, 2010), hal. 9.

60 Kundani, ‘Spooked!’, hal. 23-27, 33

61 John Denham – Connecting communities’. *Department for Communities and Local Government*, 14 Oktober 2009.

2006 hingga 2011 hanya sembilan dari total 2313 serangan teroris di Uni Eropa—baik yang berhasil digagalkan maupun yang berhasil dieksekusi—yang dilakukan oleh kelompok Islam. Yang artinya, umat Islam hanya bertanggung jawab 0,39% dari total keseluruhan.⁶² Karena itu, hal ini menunjukkan bahwa hanya berfokus pada Muslim dalam strategi PVE secara empiris sangatlah cacat.

PVE versi AS, yang lebih dikenal dengan sebutan Countering Violent Extremism (CVE), juga telah menimbulkan perlawanan yang cukup besar dari masyarakat Muslim Amerika, yang melaporkan bahwa, dalam semua program percontohan, mereka adalah satu-satunya target.⁶³ Meskipun mengganggu hak-hak sipil, inisiatif tersebut diperluas ke dalam sistem sekolah umum. FBI baru-baru ini merilis pedoman baru untuk melakukan pengawasan terhadap siswa SMA di seluruh negeri.⁶⁴

Moderat dan Ekstremis

Profesor Arun Kundnani, dari New York University, menyimpulkan PVE sebagai “strategi untuk melakukan intervensi di dalam dinamika umat Islam dalam rangka memenangkan hati dan pikiran dan mengamankan kesetiaan terhadap demokrasi liberal Barat.”⁶⁵

PVE mempunyai dua gigi utama:

Pertama, program ini berusaha mensponsori organisasi Muslim moderat untuk menentang “ideologi ekstremisme” dan mempromisikan akomodasi terhadap nilai-nilai Barat. Ratusan juta dollar sudah tersedia bagi mereka yang ingin mengemban tugas tersebut. Di Inggris, dana yang dianggarkan untuk program tersebut pada tahun

2008/2009 saja sebesar 140 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,6 Trilyun.⁶⁶

Kedua, program ini juga berusaha untuk melakukan *profiling* terhadap orang-orang yang dicurigai hanyut ke dalam “radikalisasi”, yaitu mengadopsi ide-ide ekstremis. Melalui sistem pengawasan yang melibatkan guru, tenaga kesehatan, dan juga para pemuda, orang-orang yang diduga akan menjadi radikal diidentifikasi dan diberikan konseling, mentoring, serta bimbingan agama untuk mengalihkan mereka dari pandangan ekstrim.

Banyak pihak di Washington menjuluki PVE ini sebagai senjata yang sangat penting dalam apa yang mereka sebut sebagai “*war within*”, perang di dalam negeri, fase berikutnya dalam Perang Melawan Teror. Mereka berargumen bahwa “pemerintah tidak bisa menunggu sampai ide teroris beralih menjadi aksi terorisme. Karenanya, harus ada intervensi dini dalam proses tersebut untuk mengecilkan sirkulasi ide tersebut. Dan dalam sebuah masyarakat liberal, ketika ide tidak bisa dengan mudah dikriminalisasi, *Prevent* adalah alternatif yang bisa hidup terus dan diperlukan.”⁶⁷

Mensponsori kelompok moderat untuk mempromosikan pesan-pesan anti ekstremis yang diminta oleh pemerintah, dalam praktiknya dilakukan dengan mendanai para ulama dan imam masjid untuk menyebarkan interpretasi Islam versi pemerintah. Dengan demikian, **dalam PVE, pemerintah melakukan intervensi ke dalam debat teologis tentang makna sejati dari agama. Tentu saja, hal ini merupakan pelanggaran yang sangat paradoks dengan prinsip sekularisme yang dianut pemerintah yang komunitas umat Islam justru dipaksa untuk berpegang atasnya.**

62 Europol, ‘TE-SAT 2012: EU Terrorism Situation and Trend Report’ (The Hague, European Police Office, 2012), hal. 36.

63 <https://www.cair.com/government-affairs/13063-brief-on-countering-violent-extremism-cve.html>

64 <http://www.alternet.org/grayzone-project/fbi-has-new-plan-spy-high-school-students-across-country>

65 <http://edition.cnn.com/2010/OPINION/12/16/kundnani.prevent.muslim/>

66 <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/7540456/The-Prevent-strategy-a-textbook-example-of-how-to-alienate-just-about-everybody.html>

67 https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf

Bagi organisasi Islam yang mampu mempresentasikan diri sebagai “moderat”, bantuan keuangan dan sumber daya akan diberikan. Perbedaan antara “moderat” dan “ekstremis” bisa secara fleksibel dieksploitasi oleh pemerintah untuk memarginalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakannya. Penggunaan anggaran pemerintah untuk mempromosikan penafsiran agama tertentu juga bisa berbahaya.

Dalam penelitiannya di Inggris, Kundnani menemukan beberapa problem potensial yang muncul jika pendekatan semacam itu diterapkan. Istilah moderat dan ekstremis pada kenyataannya didefinisikan oleh derajat dukungan dari umat Islam terhadap pemerintah. Atmosfer umum yang dihasilkan oleh PVE adalah mereka yang melakukan kritik berisiko kehilangan dana dan menghadapi isolasi sebagai seorang ekstremis, sedangkan kelompok yang menggaungkan garis politik pemerintah akan diberi hadiah dengan dana publik yang besar. Fenomena tersebut justru menunjukkan bahwa PVE hanya digunakan untuk menanam pemimpin komunitas yang loyal, atau dalam istilah yang digunakan dalam laporan Conflict Forum, PVE digunakan untuk membangun Islam yang patuh pada pemerintah.⁶⁸ Organisasi yang menolak untuk bekerja dalam proyek PVE, mengkritik, atau menarik diri darinya karena khawatir dengan masalah yang akan timbul darinya, akan dicap sebagai ekstremis.

Kategori ‘muslim moderat’ pun didefinisikan secara teologis, yang bisa menyebabkan bahaya potensial dari dukungan pemerintah terhadap tren agama yang lebih mereka sukai tersebut. Ekstremisme dilihat oleh pemerintah sebagai ‘kesalahan tafsir’ Islam yang membenarkan terorisme. Untuk melawannya, mereka mengidentifikasi dan memperkuat Muslim moderat yang bisa memberikan alternatif penafsiran Islam yang sesuai dengan arah yang diinginkan pemerintah. Salah satunya programnya,

PVE adalah “strategi untuk melakukan intervensi di dalam dinamika umat Islam dalam rangka memenangkan hati dan pikiran dan mengamankan kesetiaan terhadap demokrasi liberal Barat.”

pemerintah Inggris memberikan dukungan terhadap program *road show* untuk “mengcounter propaganda ekstremis dan mencelanya dengan cap tidak Islami”.

Dana PVE pun digunakan secara luas untuk mendanai masjid yang dianggap moderat, meningkatkan profesionalisme mereka, dan menjadikan mereka sebagai partner dalam program PVE yang lebih luas. Masjid-masjid moderat tersebut diminta untuk menyapa para pemuda dan memenangkan hati mereka. Mereka juga memberikan pelatihan kepada imam masjid untuk mengidentifikasi orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda ‘kesalahan tafsir Al-Quran’.

Dalam praktik PVE yang sudah dilakukan di Inggris, mereka juga mendanai Dewan Masjid untuk membuat materi ajar di madrasah. Sebagian besar materi tersebut berisi usaha untuk memperkenalkan konsep kunci dalam agama Islam. Mereka masuk dalam ranah penafsiran sumber-sumber Islam yang bermanfaat bagi program PVE. Contoh, beberapa ayat ditafsirkan dengan makna, “akar dari ekstremisme, rasisme, dan *bullying* adalah kebencian—dan ketiganya bisa merusak masyarakat... kebencian juga bisa menyebabkan arogansi dan sentimen anti-Barat—dan ini bukanlah apa yang diajarkan oleh Islam.”⁶⁹

Persepsi bahwa pemerintah mensponsori organisasi Islam dengan basis kriteria teologis—contohnya, kaum sufi lebih disukai dibanding

68 Conflict Forum, “Culture of Resistance”, winter 2009-2010, Volume I/Issue 3

69 Nasiha, *Loving Humanity and Avoiding Hatred*, hal. 12.

salafi—justru bertentangan dengan paham sekuler yang mereka anut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asma Jahnangir, Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama atau Keyakinan, “bukan peran pemerintah untuk mencari “suara sejati dari Islam” atau keyakinan agama lain. Karena agama atau keyakinan bukanlah entitas homogen, maka sebaiknya harus diakui dan diperhitungkan perbedaan suara tersebut.”⁷⁰

Medan tempur “perang ide” ini dilakukan pada perilaku dan opini masyarakat Muslim. Kemungkinan kemenangan ekstremis anti Barat untuk memperoleh dukungan masyarakat Muslim terhadap tujuan-tujuan mereka dilihat sebagai tantangan strategis bagi keamanan dunia internasional. Bahayanya di sini adalah, umat Islam, dalam imajinasi sistem kontraterorisme internasional, bukan lagi warga yang menjadi tanggung jawab negara, tapi lebih cenderung dilihat sebagai rekrutmen potensial untuk perlawanan global yang mengancam tatanan dan nilai-nilai Barat.

Dimensi internasional tersebut bermakna perhatian yang diberikan pada ekstremisme jenis ini berbeda sama sekali dengan perhatian yang diberikan pada ekstremisme sayap kanan, misalnya, yang tidak lagi dianggap sebagai ancaman tatanan masyarakat. Dampaknya, muncul sebuah tekad dan seruan bahwa masalah tersebut hanya bisa diselesaikan jika umat Islam berbuat lebih untuk secara aktif melakukan mobilisasi melawan ekstremisme, dan akhirnya semakin berat beban yang diberikan kepada umat Islam secara umum dan organisasinya.

Bahasa samar seperti “moderat” dan “ekstremis” bisa dengan mudah dieksploitasi untuk membungkam pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan pemerintah, baik dari sudut pandang ideologi Islam maupun opini pribadi tentang kebijakan pemerintah. Bagi

sebuah negara yang berpedoman pada demokrasi, hal ini tentu saja merusak demokrasi itu sendiri. Problem mendasar dari PVE adalah asumsinya yang menandakan bahwa sebuah pemerintah yang demokratis bisa memaksa opini politik atau agama kepada warga negaranya sendiri. Di abad ke-21, pendekatan semacam itu bisa menjadi serangan balik yang sangat kuat.

Dari penelitian yang telah dilakukan, **Arun Kundnani juga menyimpulkan bahwa pada dasarnya, program PVE pada kenyataannya adalah kebijakan pemerintah terhadap Islam.**⁷¹ PVE datang untuk mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan umat Islam. **Hati dan pikiran mereka kini menjadi target dari sebuah pengawasan, pemetaan, dan propaganda yang terstruktur.** Fokus PVE adalah untuk mempromosikan nilai-nilai bersama dan menentang ektremisme kekerasan. Di Inggris, PVE pun dianggap sebagai bagian integral dari sistem kontraterorisme yang otoriter yang melanggar hak asasi umat Islam.

Dengan PVE, mereka berusaha masuk ke dalam ranah teologis untuk menentukan bagaimana Islam yang benar. Realita ini direpresentasikan oleh pernyataan gamblang yang di sampaikan oleh Tony Abbott, mantan Perdana Menteri Australia, yang menyatakan bahwa dalam kampanye hati

Dalam PVE, pemerintah melakukan intervensi ke dalam debat teologis tentang makna sejati dari agama. Tentu saja, hal ini merupakan pelanggaran yang sangat paradoks dengan prinsip sekularisme yang dianut pemerintah yang komunitas umat Islam justru dipaksa untuk berpegang atasnya.

70 <http://www.sacc.org.uk/news/2009/ihrcc-condemns-new-government-anti-terror-proposals>

71 Arun Kundnani, 'Spooked!', hal. 8

Kategori 'muslim moderat' pun didefinisikan secara teologis, yang bisa menyebabkan bahaya potensial dari dukungan pemerintah terhadap tren agama yang lebih mereka sukai tersebut. Ekstremisme dilihat oleh pemerintah sebagai 'kesalahan tafsir' Islam yang membenarkan terorisme. Untuk melawannya, mereka mengidentifikasi dan memperkuat Muslim moderat yang bisa memberikan alternatif penafsiran Islam yang sesuai dengan arah yang diinginkan pemerintah.

dan pikiran melawan pandangan ekstrem dalam keyakinan Islam, diperlukan revolusi agama. "Kita tidak bisa terus menyangkal tentang masalah besar yang ada dalam Islam. Islam perlu mendeligitimasi perintah untuk membunuh orang yang menghina Nabi—dan hanya Muslim yang bisa melakukannya."

Dalam pandangannya, Islam tidak pernah memiliki periode reformasi atau pencerahan yang sangat dibutuhkan. Bahkan, ia menyimpulkan bahwa beberapa kultur tidaklah sama sederajat. "Kita harus siap untuk memproklamirkan superioritas kultur kita dibanding kultur mereka yang membunuh orang atas nama Tuhan."⁷²

Narasi yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron.

"Kita harus sangat jelas [dalam mengidentifikasi] di mana asal mula serangan teror tersebut terletak—dan ia terletak pada keberadaan ideologi, yaitu ekstremisme Islam. Kita juga harus dengan jelas menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah

tersebut, untuk membedakannya dengan Islam. Islam adalah agama, yang dianut dengan penuh kedamaian dan ketaatan oleh lebih dari satu milyar manusia. Ekstremisme Islam adalah ideologi politik, yang didukung oleh minoritas.

Ujung paling jauh adalah mereka yang mendukung terorisme untuk mempromosikan tujuan akhir mereka: pemerintahan Islam yang total, yang diatur dengan penafsiran Syariah. Sepanjang spektrum tersebut, Anda akan menemukan orang yang mungkin menolak kekerasan, tapi menerima beberapa bagian dari pandangan ekstremis termasuk memusuhi demokrasi Barat dan nilai-nilai liberal.⁷³

Ceramah yang disampaikan oleh Cameron di atas adalah sikap ideologis yang diambil oleh pemerintah Inggris, yang menunjukkan persepsi mereka tentang cara yang harus diambil untuk mengatasi ancaman politik kekerasan di Inggris. Ideologi ekstremisme Islam tersebut mereka sebut sebagai "*poisonous ideology*", ideologi beracun. Mereka mendefinisikannya sebagai "sebuah ideologi yang berdasarkan penafsiran Islam yang terdistorsi, yang mengkhianati prinsip perdamaian dalam Islam, yang ditarik dari pengajaran orang-orang seperti Sayyid Qutb. Ekstremis Islam memandang intervensi Barat ke dunia Islam sebagai 'perang terhadap Islam, menciptakan narasi 'mereka' dan 'kita'. Mereka berusaha menegakkan sebuah pemerintahan Islam global yang diatur dengan penafsiran Syariah mereka sebagai hukum negara, menolak nilai-nilai liberal seperti demokrasi, aturan hukum, dan kesetaraan."⁷⁴

Demikian juga Tony Blair, salah satu tokoh Barat yang sangat getol memberikan rekomendasi tentang segala permasalahan di dalam Islam. Dalam otobiografinya, ia menulis:

"Perang ini, saya khawatir, bukanlah perang antara kelompok ekstremis kecil dan tidak representatif melawan kita. Atau, paling tidak,

72 <http://www.sbs.com.au/news/article/2015/12/09/islam-needs-reform-abbott-says>

73 David Cameron, "PM's speech at Munich Security Conference", HM Government, 5 Februari 2011.

74 HM Government, "Tackling Extremism in the UK", Desember 2013, hal. 2

bukan hanya itu. Perang ini juga adalah perjuangan fundamental terhadap pikiran, hati, dan jiwa Islam.”⁷⁵

Sebagaimana tulisan Earl Cox—jurnalis Israel yang pernah menjadi penasihat senior empat presiden AS—dalam konteks AS, “Hentikan kebohongan! Amerika Perang Melawan Islam.”⁷⁶

Perang melawan teror kini diarahkan kepada ideologi Islam. Para pejabat Barat kini terjebak dalam kancah perdebatan teologis. Bahkan, Barack Obama sendiri terapung dalam kubangan *takfiri* saat dia mengklaim bahwa *Islamic State* “tidaklah Islami”.⁷⁷ Ironis memang, karena dia adalah seorang non-Muslim anak dari seorang Muslim, yang bisa diklasifikasikan sebagai seorang *murtad*, dan kini justru melakukan praktik *takfir* atas Muslim. “Hal ini tentu saja menjadi bahan tertawaan bagi para jihadis. Seperti babi yang berlumur kotoran memberi nasihat soal higienitas,” kata Graeme Wood, dari Yale University.⁷⁸

Aneh memang. Saat Barat berusaha mendiskreditkan kelompok radikal Islam dengan label *takfiri*, mereka juga melakukan hal yang sama dengan menganggap bahwa kelompok tersebut bukan bagian dari Islam. Jika demikian, mereka juga terjebak dalam logika berpikir *takfiri*, yang anehnya, mereka labelkan kepada kelompok yang mereka anggap ekstrim. Namun, tidak aneh jika kita melihat bagaimana Perang Global Melawan Teror ini dimainkan, standar ganda dan kesalahan logika adalah suatu hal yang sering dilakukan oleh Barat.

Meski PVE seringkali dibingkai tidak untuk mengarah pada agama atau ideologi tertentu, Article 19 mencatat bahwa program tersebut sangat menargetkan Muslim, dengan beberapa program khusus ditujukan kepada wanita Muslimah dan menstigmatisasi mereka.⁷⁹ Dalam banyak literatur

Bahasa samar seperti “moderat” dan “ekstremis” bisa dengan mudah dieksploitasi untuk membungkam pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan pemerintah, baik dari sudut pandang ideologi Islam maupun opini pribadi tentang kebijakan pemerintah.

resminya, PVE berusaha menolak bahwa program tersebut adalah usaha yang cenderung menargetkan umat Islam. Namun, realita di lapangan menunjukkan hal yang lain.⁸⁰ Alokasi sumber daya tidak bohong soal ini. Di Inggris, dalam penerapan program pencegahannya, stigmatisasi pada umat Islam sangat terasa.⁸¹ Dalam program *prevent* yang didanai oleh USAID, misalnya, hampir secara eksklusif menargetkan wilayah yang dianggap terancam oleh ekstremis yang dipengaruhi oleh Islam. Sebaliknya, program tersebut tidak dilakukan dalam wilayah kekerasan yang dihasut oleh Budha di Myanmar.⁸²

PVE nampak sebagai usaha untuk secara sembunyi-sembunyi mendefinisikan apa Islam yang sah dan apa Islam yang tidak sah. Tentunya dalam pandangan resmi pemerintah, sesuai dengan arah tatanan dunia saat ini. “Ini adalah maksud sejati dari *Prevent*. Ia adalah program rekayasa sosial untuk melegitimasi versi Islam yang disponsori oleh pemerintah,”⁸³ tutur Asim Qurashi, Direktur Penelitian CAGE di Inggris. Cara pandang Islam terhadap persoalan dunia, yang mempertanyakan efektivitas demokrasi liberal dalam menghadapi tantangan global, adalah targetnya.

75 Tony Blair, “A Journey”, Arrow Books, London, 2011, hal. 348

76 [http://www.jpost.com/Blogs/Israel-Uncensored/Stop-the-Lie-](http://www.jpost.com/Blogs/Israel-Uncensored/Stop-the-Lie-America-IS-at-War-with-Islam-364460)

77 <http://edition.cnn.com/2014/09/10/politics/obama-isil-not-islamic/>

78 <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/>

79 <http://www.theguardian.com/politics/2016/jan/18/david-cameron-stigmatising-muslim-women-learn-english-language-policy>

80 <https://theglobalobservatory.org/2016/01/countering-violent-extremism-indonesia/>

81 <http://www.bbc.com/news/uk-28939555>

82 <https://www.usaid.gov/countering-violent-extremism>

83 <http://www.cageuk.org/article/prevent-policy-politically-motivated-programme>

“Program PVE pada kenyataannya adalah kebijakan pemerintah terhadap Islam. PVE datang untuk mendefinisikan hubungan antara pemerintah dan umat Islam. Hati dan pikiran mereka kini menjadi target dari sebuah pengawasan, pemetaan, dan propaganda yang terstruktur.”

Apakah Kepedulian Adalah Sebuah Kejahatan?

Strategi PVE tidak mengenal kebijakan luar negeri dan intervensi Barat di dunia Islam sebagai motivator atau penyebab kekerasan, namun ia menggunakan keluhan dan opini tentang ketidakadilan, penindasan, dan kebijakan luar negeri, sebagai tanda kecenderungan pada kekerasan. Kebijakan ini tidak hanya akan memberikan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya bagi aktivis hak asasi manusia dan organisasi yang *concern* pada keadilan, namun lebih daripada itu, kebijakan ini mengancam salah satu nilai inti dari Islam, yaitu keadilan sosial.

PVE mengawasi atau bahkan menutup dan membubarkan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Islam, saat diskusi mengenai penyiksaan atas nama perang melawan teror, penindasan terhadap umat Islam, dll dilakukan. PVE juga menargetkan organisasi kemanusiaan yang membantu rakyat Suriah yang membutuhkan bantuan.

“Mereka tidak ingin umat Islam memberikan perhatian dan kasih sayang pada umat Islam lainnya yang sedang menderita di belahan dunia lainnya,” kata Qureshi. PVE menyerang jantung identitas persaudaraan transnasional yang dimiliki oleh umat Islam, dan mencoba menutupi prinsip inti Islam yang menawarkan alternatif bagi sistem neo liberal global yang agresif.

Peristiwa di Timur Tengah akhir-akhir ini menempatkan umat Islam sebagai sasaran pengawasan. Kebijakan umum di dunia internasional pun banyak berfokus pada mereka. Ini adalah *chapter* terbaru dari sebuah serangan ideologis yang sudah, sedang, dan akan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Serangan pada konsep Islam tentang perang, pemerintahan, dan persatuan negeri Islam bukanlah hal yang baru. Namun eskalasinya semakin meningkat sejak munculnya *Islamic State* (IS) dan deklarasi mereka tentang khilafah. Persoalannya bukanlah pada mendukung atau menentang kekhilafahan versi *Islamic State*, tapi lebih pada kriminalisasi pikiran politik dan ideologi Islam. Konsep tentang *jihād*, *syariah*, dan *khilafah* bukanlah eksklusif milik *Islamic State*, tapi merupakan inti doktrin Islam yang dianut oleh sepertiga penduduk dunia.

Sifat *Islamophobia* sangat terlihat dari kriminalisasi yang diarahkan kepada mereka yang pergi ke Suriah menolong saudara Muslimnya yang sedang menderita, namun tidak pada kaum Yahudi yang berperang bersama dengan tentara Israel (IDF) saat mereka juga terlibat kejahatan perang, seperti serangan ke Gaza.

Di sisi lain, umat Islam yang ingin menolong saudaranya melalui bantuan kemanusiaan, mendapati rumahnya digerebek, diganggu oleh aparat keamanan, dan dituduh terlibat dalam terorisme. Organisasi kemanusiaan mendapati rekening banknya dibekukan tanpa penjelasan, hanya karena terlibat di zona konflik, seperti di Gaza dan Suriah.

Individu dan organisasi dalam komunitas Islam yang bicara menentang kebijakan pun diserang. Mereka disebut sebagai simpatisan teroris, ekstremis, dan jihadis. Bahkan, beberapa dipenjara. Elemen umum dari seluruh kasus di atas adalah mereka semua dikriminalisasi karena mereka peduli. **Dalam kacamata PVE, kepedulian adalah sebuah kejahatan.**

Dalam salah satu programnya, pemerintah Inggris menggunakan salah seorang pemuda Muslim, Humza Irshad, untuk membintangi sebuah video pendek yang bertujuan untuk mencegah pemuda Muslim Inggris dari terlibat dengan ekstremisme. **“Engkau bisa pergi dan bertemu dengan mereka, dan melakukan satu hal yang bodoh dan kemudian merusak kehidupanmu,”** begitu dia mengingatkan sepupunya. Menanggapi *statement* Irshad dalam video tersebut, Fahad Ansari, salah seorang pengacara asal Inggris yang *concern* pada hak asasi manusia, berharap agar ada yang memberi nasihat yang sama kepada Irshad sebelum ia bergabung dengan program PVE.⁸⁴

Mengutip salah satu *statement* yang ditulis dalam penelitian Kundnani, **“Strategi Prevent menganggap keyakinan Islam sebagai masalah. Bagaimana mungkin Anda menerima uang yang menodai agama Anda?”**⁸⁵

Menurut kesimpulan dari CAGE, PVE adalah program yang dimotivasi oleh politik, bukan strategi kontraterorisme. Dan alasan kenapa ia berhasil diterapkan adalah sebagian umat Islam dengan mudah menerima narasi tunggal yang disetir oleh Barat yang berlaku dalam “perang melawan teror”.⁸⁶ “Kita cukup naif secara politik. Kita tidak mempertanyakan asumsi dasar tentang siapa Muslim [yang baik itu] dan apa yang mereka yakini,”⁸⁷ sambung Qureshi. Narasi yang digunakan terkait dengan kekerasan politik, ekstremisme, radikalisasi, dan persoalan Islam/Muslim sangat dipengaruhi oleh *think tanks* AS dan Inggris serta kelompok kebijakan mereka, yaitu bersifat ideologis dan politis.⁸⁸

Hasilnya adalah sebuah kebijakan yang tidak lagi tentang pencegahan kekerasan yang termotivasi oleh politik—yang disebabkan oleh

Dalam kacamata PVE, kepedulian adalah sebuah kejahatan.

dukungan Barat pada pemerintah yang zalim dan penindasan yang mereka lakukan pada dunia Islam, bukan ideologi—tapi lebih kepada kebijakan untuk mengalahkan ideologi Islam itu sendiri, dengan hanya menerima Islam yang bersahabat bagi nilai-nilai Barat. Menurut Qureshi, “Mereka ingin agar kita duduk saja dan berzikir di rumah.”⁸⁹

Dalam praktiknya, menurut Fahad Ansari, PVE adalah “kriminalisasi terhadap apa yang kita pegang dengan teguh, bahkan sampai kalimat **“Laa ilaaha illallah, Muhammad rasulullah”** pun terancam. Ia dimulai dengan [menyasar] keyakinan politik, pembelaan diri, kemudian ke arah *jihad*, *syariat*, dan *khilafah*. Dan akhirnya, ini terus bergerak menuju makanan halal, bagaimana kita mengelola sekolah kita, bahkan sampai masuk ke persoalan privasi di rumah kita, seperti bagaimana cara kita berpakaian. *Prevent* tidak sekadar berpengaruh pada jihadi, wahabi, salafi, tapi ia menyasar semua umat Islam yang masih berpegang pada **“Laa ilaaha illallah, Muhammad rasulullah”**. Dan mereka akan terus merangsek, hingga pada kalimat syahadat itu sendiri. Mereka menciptakan iklim yang tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat, tidak ada ruang bagi bantuan terhadap saudara-saudara Muslim kita yang menderita. Anda hanya punya dua pilihan: melakukan dengan cara mereka atau tidak melakukan sama sekali.”⁹⁰

Dengan program PVE-nya, Barat berusaha mendefenisikan ulang Islam. Meski dalam retorikanya ingin perdamaian dan persatuan,

84 <http://www.cageuk.org/article/and-then-they-came-our-parents>

85 idem, hal. 27

86 <http://www.cageuk.org/report.pdf>

87 <http://www.cageuk.org/article/prevent-policy-politically-motivated-programme>

88 Cage Prisoners, “Good Muslim, Bad Muslim: A Response to the Revised Prevent Strategy”, London, 2011, hal. 6.

89 idem

90 <https://www.youtube.com/watch?v=gz1b9wT1H7s&nohtml5=False>

realitanya mereka justru berusaha memecah belah Islam dengan membuat pengelompokan: Islam moderat dan Islam ekstrim. Padahal, mengutip pernyataan Mufti Fayezullah dari Bangladesh kepada New York Times, “Islam adalah Islam, dan akan selalu demikian hingga hari kiamat.”⁹¹

Mungkin, mereka bisa memotong seluruh bunga, namun mereka tidak bisa mencegah datangnya musim semi.

“Strategi Prevent menganggap keyakinan Islam sebagai masalah. Bagaimana mungkin Anda menerima uang yang menodai agama Anda?”

⁹¹ http://www.nytimes.com/2016/03/26/world/asia/a-revived-challenge-to-islam-as-bangladeshs-state-religion-goes-to-court.html?_r=0